

PEMETAAN SPEKTRUM IDEOLOGI MUATAN BUKU AJAR DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH ALIYAH

TIM PENELITI
Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS)
Universitas Muhammadiyah Surakarta



LAPORAN PENELITIAN

PEMETAAN SPECTRUM IDEOLOGY MUATAN BUKU AJAR DAN GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH ALIYAH

Vol. 2 | No. 6 | Tahun 2019

Penanggung Jawab:

PPIM UIN Jakarta; UNDP Indonesia

Penulis: Yayah Khisbiyah dan Azaki Khoirudin

Peneliti:

Yayah Khisbiyah (Koordinator)

Azaki Khoirudin, Abdullah Aly, Sri Lestari, Agus Triyono, Ridho Subkhi,
Fauzan Anwar Sandiah dan Arief Maulana

Editor: Arief Maulana

Tata Letak: Ragil Setia Budi

Penerbit:

Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS)

Gedung Induk Sitiwalidah Lantai 5

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah 57162

Telp. (0271) 717 417 ext. 1521

Email: psbps@ums.ac.id

Website: psbps.ums.ac.id

ISBN: 978-623-91744-1-5

KATA PENGANTAR

CONVEY Report ini didasarkan atas hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial - Universitas Muhammadiyah Surakarta (PSBPS UMS) bekerjasama dengan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam program CONVEY Indonesia dengan judul "Pemetaan Spektrum Ideologi Muatan Buku Ajar dan Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah". Penelitian ini menganalisis isi buku ajar dalam mata pelajaran; *Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)* yang digunakan di Madrasah Aliyah terbitan Kemenag RI yang disusun berdasarkan paradigma Kurikulum 2013. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara mendalam dan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) terhadap guru agama di 5 kota/provinsi (Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Manado, dan Jakarta).

Banyak pihak yang telah berperan dengan caranya masing-masing sehingga Laporan Penelitian ini dapat disajikan dengan baik di hadapan pembaca. Kami menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini, baik dalam bentuk pendanaan serta masukan konstruktif. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta, melalui Rektor dan LPPM UMS atas dukungannya dalam pelbagai hal seperti ketersediaan kantor untuk kami menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian ini.

Terakhir, apresiasi mendalam juga kami sampaikan kepada tim Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial - Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas semua dedikasi dan kerja keras yang dicurahkan dalam pengorganisasian kegiatan penelitian di semua tahapannya. Tidak lupa, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada asisten peneliti lokal yang sudah berjuang terutama dalam proses pengumpulan data.

Semoga laporan penelitian ini turut berkontribusi bagi perbaikan pendidikan agama yang inklusif dan progresif, dalam upaya bersama lebih meningkatkan kualitas modal sosial dan rekatan tenun sosial yang adil-harmonis di tanah air tercinta.

Surakarta, 19 Februari 2019

Yayah Khisbiyah & Azaki Khoiruddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | ii

DAFTAR ISI | iii

A. LATAR BELAKANG | 1

1. Fokus Kajian | 2
2. Definisi Konseptual | 3

B. METODOLOGI | 5

1. Kajian Dokumen | 5
2. Rekrutmen Informan Penelitian | 6
3. Wawancara Mendalam dan Pengamatan | 13
4. Diskusi Kelompok Terpumpun (*Focused Group Discussion*) | 13

C. PETA IDEOLOGI BUKU AJAR PAI MADRASAH ALIYAH | 14

1. Fragmentasi dan Keragaman Ideologi | 14
 - a. Potensi Eksklusifisme | 15
 - b. Potensi Fatalisme: Kegagalan Transformasi Akidah | 18
 - c. Potensi Fanatisme dan Sektarianisme | 20
 - d. Pesan Ekstremisme | 22
2. Ambivalensi dan Kegagalan Kontekstualisasi | 23

D. SPEKTRUM IDEOLOGI GURU PAI MADRASAH ALIYAH | 27

1. Konservatif dalam Keyakinan, Moderat dalam Praktik | 27
2. Toleransi Kembar di Lima Kota | 31
3. Guru sebagai Agen Moderatisme Islam | 35

E. PELUANG MODERATISME | 37

F. KESIMPULAN | 39

DAFTAR REFERENSI BACAAN | 41

APPENDIKS | 45

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, buku ajar menjadi komponen penting, karena menjadi media belajar wajib bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan, menghayati nilai, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Di samping itu, guru agama di sekolah Islam juga tak kalah memainkan peranan utama sebagai *transmitter* nilai-nilai keislaman bagi pembentukan corak keberagamaan siswa. Buku ajar maupun guru Pendidikan Agama Islam (selanjutnya disingkat PAI) diyakini telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan pemahaman, sikap dan perilaku sosial-keagamaan melalui pengembangan karakter, moralitas, dan etika keislaman siswa. Pertanyaannya, di tengah menajamnya wacana ketegangan antar budaya dan agama saat ini, apakah PAI selaras dengan, dan mampu berkontribusi secara substantif pada, pengembangan karakter keberagamaan Islami yang toleran, inklusif dan pluralis?

Wacana mengenai intoleransi, eksklusivisme dan ekstremisme yang terkandung dalam PAI yang disosialisasikan oleh guru-guru agama, telah banyak dilaporkan hasil penelitian berbagai lembaga. Center for Religious and Cross-Cultural Studies/CRCs (2015) misalnya, menyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2013 ditengarai banyak mengandung muatan materi tentang doktrin, kurang menghargai keberagaman, serta terbatas dalam mendorong terjadinya interaksi harmonis antar umat beragama. PPIM UIN Jakarta (2018) menemukan sebagian guru agama memiliki pemahaman agama yang intoleran-radikal akibat ideologi Islamisme. Tidak cukup di situ, didapati bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan sikap keagamaan tidak hanya dari guru mata pelajaran agama dan dosen mata kuliah agama, tetapi juga dari guru dan dosen mata pelajaran/mata kuliah lain, seperti sains, bahasa, dan konseling. Temuan ini memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya dari Ma'arif Institute (2011), PSBPS UMS (2012, 2009), Wahid Foundation (2017), dan Pascasarjana UIN Yogyakarta (2018).

Madrasah Aliyah (selanjutnya disingkat MA) adalah salah satu bentuk dari institusi pendidikan yang mengajarkan topik-topik akademik keislaman seputar doktrin, sumber-sumber otoritas dalam agama, bahasa, hukum Islam, dan pengetahuan sejarah. Selain materi keislaman, Madrasah Aliyah juga menyediakan pembelajaran ilmu sosial (Sosiologi-Ekonomi) dan ilmu pasti (Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia). Berdasarkan statistik tahun ajar 2014/2015, Madrasah Aliyah baik Negeri maupun Swasta berjumlah 7.582 sekolah. Madrasah Aliyah berada di bawah otoritas Kementerian Agama (KEMENAG), menjadi bagian dari babak sejarah modernisasi institusi pendidikan Islam yang dimulai pada tahun 1970-an oleh Abdul Mukti Ali sebagai Menteri Agama. Sistem Pendidikan Nasional

No. 2 tahun 1989 mengukuhkan eksistensi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan formal.

Berangkat dari kegelisahan bahwa hasil riset PPIM (2018) ditemukan buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) untuk SMP dan SMA ternyata ditemukan konten yang mengajarkan eksklusivisme dan sikap intoleran terhadap kelompok dan penganut agama lain (Hamid Nasuhi dkk, 2018). Karena itu, Penelitian ini akan mengulas peta spektrum ideologi pada kandungan materi buku Ajar di bawah KEMENAG dan keterkaitannya dengan guru PAI di Madrasah Aliyah. Novelty atau kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan berbagai studi sebelumnya adalah: (1) pergeseran paradigma penelitian dari war on terrorism ke preventing violent extremism; (2) penggunaan framework binadamai agama (*religious peacebuilding*) melalui peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam yang inklusif dan progresif.

1. Fokus Kajian

Melanjutkan studi yang sudah dilakukan, penelitian ini akan difokuskan pada buku teks PAI yang tersedia dan digunakan oleh guru PAI di Madrasah Aliyah. Fokus riset ini adalah melakukan pemetaan muatan materi buku ajar dalam mata pelajaran; *Al-Qur'an Hadis*, *Akidah Akhlak*, *Fiqih*, dan *Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)* yang lazim digunakan di sekolah-sekolah Islam (Madrasah Aliyah) terbitan Kemenag RI disusun berdasarkan paradigma Kurikulum 2013. Untuk melihat keterkaitan dengan Guru PAI, maka penelitian ini mengkaji persepsi dan spektrum ideologi guru PAI Madrasah Aliyah di lima Kota/Kabupaten: Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, dan Manado.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan: *Pertama*, memetakan muatan buku ajar PAI terbitan KEMENAG yang digunakan di kelas X-XII Madrasah Aliyah. *Kedua*, memahami pandangan guru PAI terhadap buku ajar PAI, serta penggunaan, apropriasi, dan inovasinya oleh guru sebagai bahan ajar di kelas, termasuk identifikasi bahan ajar alternatif yang digunakan guru sebagai suplemen untuk melengkapi atau mengganti materi buku ajar PAI terbitan KEMENAG. *Ketiga*, memetakan spektrum ideologi guru yang dipengaruhi oleh berbagai faktor disposisi psikososial guru, serta diidentifikasi melalui pandangan guru terkait isu-isu keislaman kontemporer, kebangsaan dan kemanusiaan. *Keempat*, memberikan *evidence-based* data baru berdasarkan hasil penelitian tentang pemetaan buku ajar serta spektrum ideologis guru yang dapat menginformasikan dan mendukung pengembangan kebijakan dan strategi yang efektif untuk penguatan Islam moderat-progresif di Indonesia melalui PAI di Madrasah Aliyah.

2. Definisi Konseptual

Ada beberapa definisi konseptual dalam penelitian ini. *Pertama*, *buku ajar*, didefinisikan sebagai karya tulis berbentuk buku standar yang digunakan sebagai panduan guru dan siswa dalam proses belajar

mengajar *untuk* maksud dan tujuan instruksional. Buku ajar yang diteliti mencakup mata pelajaran, yaitu *Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)* pada tingkat Madrasah Aliyah kelas X, XI, dan XII. Kedua, disposisi psikososial guru, yang mencakup kognisi, sikap dan perilaku yang dipengaruhi bermacam faktor psikososial-politik dan lingkungan budaya seperti harapan-harapan (*expectations*), aliran-aliran keagamaan (*religious streams*), serta *world views* yang dimiliki guru (Murray, 2007; Ruitenberg, 2011). Buku ajar adalah teks, sedangkan disposisi psikososial guru adalah konteks. Penelitian ini mencermati bagaimana teks berdialektika dengan konteks, yaitu bagaimana guru melakukan *filtering/selecting* dan selanjutnya *modification/alterations* terhadap buku ajar, sesuai disposisi psikososialnya. Ketiga, dimensi pedagogis. Ranah sasaran pembelajaran terdiri dari 3 tingkatan yaitu (1) Kognitif berupa ranah pengetahuan atau *knowing* dalam memahami ajaran agama; (2) Afektif atau *feeling, believing*, yang memiliki komponen sikap dan keyakinan terkait dengan komitmen keagamaan; dan (3) Perilaku atau *doing, practicing*, yakni perilaku nyata sebagai konsekuensi logis dari perwujudan pengetahuan dan keyakinan (Bloom, 1965; Krathwohl, 2001).

Keempat, spektrum Ideologis. Kategori keyakinan keagamaan guru yang terentang dalam 3 variasi, yaitu konservatif, moderat, dan progresif. Ketiga kategori ini digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis muatan buku ajar dan ideologi keagamaan guru. Matriks spektrum ideologis dengan masing-masing indikatornya adalah sebagai berikut:

Kategori Spektrum	Konservatif	Moderat	Progresif
	Tekstual	Kontekstual	Humanis
	Eksklusif	Inklusif	Pluralis
	Intoleran	Toleran	Kosmopolit

Ketiga kategori ideologi keagamaan beserta 9 indikatornya ini disebut sebagai spektrum, karena dalam realitas seringkali masing-masingnya tidak terpisah satu sama lain secara kaku atau *rigid*, namun cair atau *fluid*, dimana satu kategori dapat berkelindan, beririsan, atau berkelanjutan dengan lainnya. Namun untuk memudahkan pemaknaan terhadap kepelbagaian yang kompleks ini, kategorisasi spektrum dilakukan dengan menggunakan definisi perasional akademik sebagai berikut:

Pertama, konservatif: sumber rujukan pada wahyu. Indikatornya antara lain: 1) Tekstual: pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam secara harfiah dan literal (normatif, dogmatis-teologis), dari lensa "*insider*" (posisi pengamatan dari dalam), pasti (*absolut: non-dialogis*),

apologis-defensif dan cikal bakal *truth claim*; 2) Eksklusif: kelanjutan dari corak berpikir tekstual melahirkan sikap tertutup (merasa benar sendiri: *truth claim*), akibatnya melahirkan sikap memihak/mendahulukan kelompok sendiri (*in-group*) karena memiliki sentimen apriori terhadap kelompok-kelompok luar (*out-group*); dan 3) Intoleran: memiliki prasangka (*prejudice, shu'udzan*) terhadap *the others/out-groups*; perbedaan dan keanekaragaman atau kebhinekaan dianggap sebagai beban; *negative thinking* (El Fadl, 2006).

Kedua, moderat: sumber rujukan pada wahyu dan sains. Indikatornya antara lain: 1) Kontekstual: pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam secara obyektif-saintifik menyertakan pendekatan sosiologis, antropologis dan historis sesuai perkembangan keilmuan (Saeed, 2006); 2) Inklusif: egaliter, berpikiran terbuka, berwawasan luas, dari kelompok sendiri maupun berbagai kelompok lain, tidak ekstrem (Kamali, 2015); dan 3) Toleran: berkesiapan mengenal, memahami, menghormati perbedaan, *positif thinking*, menerima perbedaan dan kebhinekaan dalam visi hidup masyarakat majemuk yang harmonis (Cox, 2006).

Ketiga, progresif¹: sumber rujukan pada wahyu, sains, dan etika. Indikatornya terdiri dari: 1) Humanis: beragama secara kritis dan welas asih, memiliki kepedulian sosial, mengkritisi ketidakadilan oleh *status quo* dan hegemon, agama untuk *problem solving*, mendukung kesetaraan gender, anti-diskriminasi, anti-penindasan, anti-terorisme dan mendukung perubahan sosial positif seperti altruisme, empati, kasih sayang, memperjuangkan keadilan sosial, ekonomi dan lingkungan (Hanafi, 2010; Engineer, 2009); 2) Pluralis: melampaui sikap toleran, tidak hanya menerima perbedaan tetapi aktif menebar nilai-nilai keindonesiaan seperti kebinnekaan, kemajemukan, multikulturalisme, persatuan, apresiatif dengan budaya lokal (baca: budaya Nusantara) (Safi, 2003); dan 3) Kosmopolit: berangkat dari pandangan tauhid (kesatuan kemanusiaan), maka melahirkan sikap menghargai kemajemukan, kesadaran sebagai masyarakat global, dan memiliki visi kemanusiaan universal (Aljunied, 2016).

B. METODOLOGI

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik penggalan data berupa analisis isi (*content analysis*), wawancara

¹ Omid Safi menawarkan konsep Muslim Progresif mengacu kepada beberapa sikap, yaitu: 1) *beyond apologetics*, 2) *no more "pamphlet Islam"*, 3) *Islam beyond "tolerance"*, dan 4) *Islam beyond "religion of peace"*. Dan salah satu elemen penting dari seorang Muslim yang progresif, menurut Safi, adalah "*the determination to hold Muslim societies accountable for justice and pluralism*" (kemauan keras untuk mempertahankan masyarakat Muslim sebagai tempat keadilan dan pluralisme). Lihat Omid Safi, *Progressive Muslims: On Justice, Gender, dan Pluralism*, (England: Oneworld Oxford, 2003)

mendalam, dan *focus group discussion* (FGD). Tim peneliti telah merumuskan desain penelitian yang dijadikan sebagai pedoman dalam pemilihan sampel, instrumen riset berupa panduan pertanyaan *interview* dan FGD, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan hasil riset.

1. Kajian Dokumen

Sumber data utama dari riset ini adalah dokumen berupa buku ajar PAI. Posisi dokumen di sini sebagai “narasumber”, maka metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode analisis isi, untuk menambah bobot dan kredibilitas dalam riset ini. Dokumen kurikulum dianalisis dari aspek kompetensi dasar PAI dalam Kurikulum 2013 untuk Madrasah Aliyah. Dokumen buku ajar PAI untuk MA dikaji dari aspek kesesuaiannya dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh KEMENAG. Ada 12 buku ajar yang diteliti, mencakup 4 mata pelajaran, yaitu *Al-Qur'an Hadis*, *Akidah Akhlak*, *Fikih*, dan *Sejarah Kebudayaan Islam* (SKI), yang masing-masingnya digunakan di kelas X-XII Madrasah Aliyah.

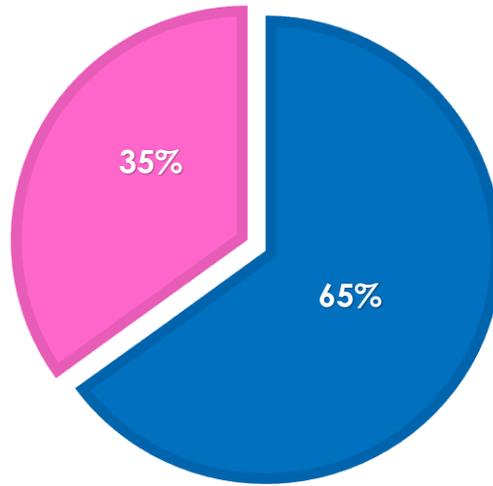
2. Rekrutmen Informan Penelitian

Lokasi penelitian tersebar di 5 Kota/Kabupaten dari 5 Provinsi di Indonesia. Kota/Kabupaten tersebut terdiri dari: Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, dan Manado. Jakarta dipilih karena merupakan ibu kota yang menjadi barometer nasional. Cirebon dipilih karena untuk wilayah Jawa Barat, Cirebon termasuk rentan dengan adanya bom panci dan insiden intoleransi serta kekerasan lainnya. Namun pada saat yang sama, Cirebon yang berlokasi di jalur Pantai Utara juga menjadi lokus perjumpaan dan pertukaran lintas budaya, dengan relasi sosial yang secara historis cukup cair. Yogyakarta dan Surakarta dipilih mewakili provinsi DIY dan Jawa Tengah, yang berdekatan secara geografis namun berbeda dalam karakter multikulturalnya. Manado dipilih sebagai kota yang mayoritas penduduknya Kristiani, untuk mencermati dinamika relasi sosial-keagamaan manakala Muslim menjadi minoritas di suatu wilayah di Indonesia yang umumnya di kota-kota lain Muslim sebagai mayoritas. Dengan pilihan 5 kota-provinsi dan dengan metodologi penelitian sistematis dalam *academic rigor* tinggi, maka sampling 5 kota-provinsi ini dapat disebut cukup mewakili wilayah sosiokultur Indonesia.

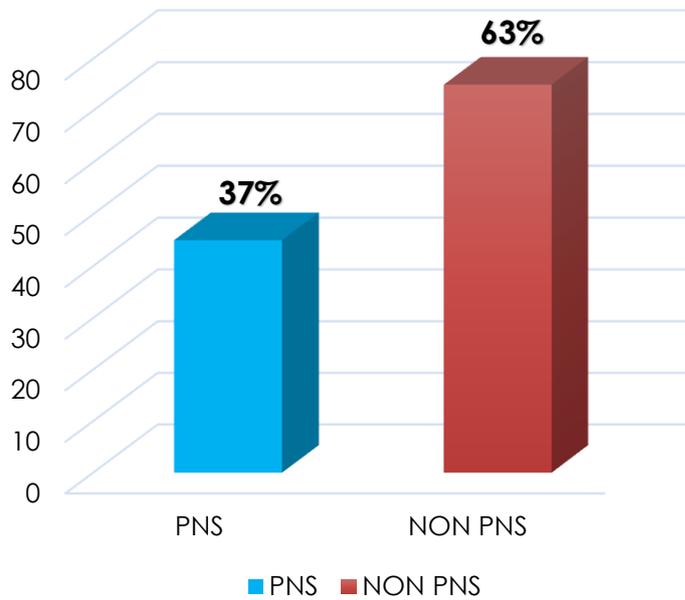
Informan dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel disengaja (*Intensity purposive sampling*), agar dapat mencerminkan keterwakilan afiliasi Madrasah (negeri dan swasta), bidang pengajaran untuk keempat mata pelajaran, dan jenis kelamin guru. Informan dalam penelitian ini berjumlah 120 guru PAI dari 5 kota-kabupaten, dengan mengupayakan keterwakilan yang berimbang antara MA negeri dan MA swasta, dan keterwakilan minimal 30% perempuan. Berikut ini adalah *profiling* ringkas dari informan guru pengampu PAI di Madrasah Aliyah di 5 kota-provinsi (N = 120):

Jenis Kelamin

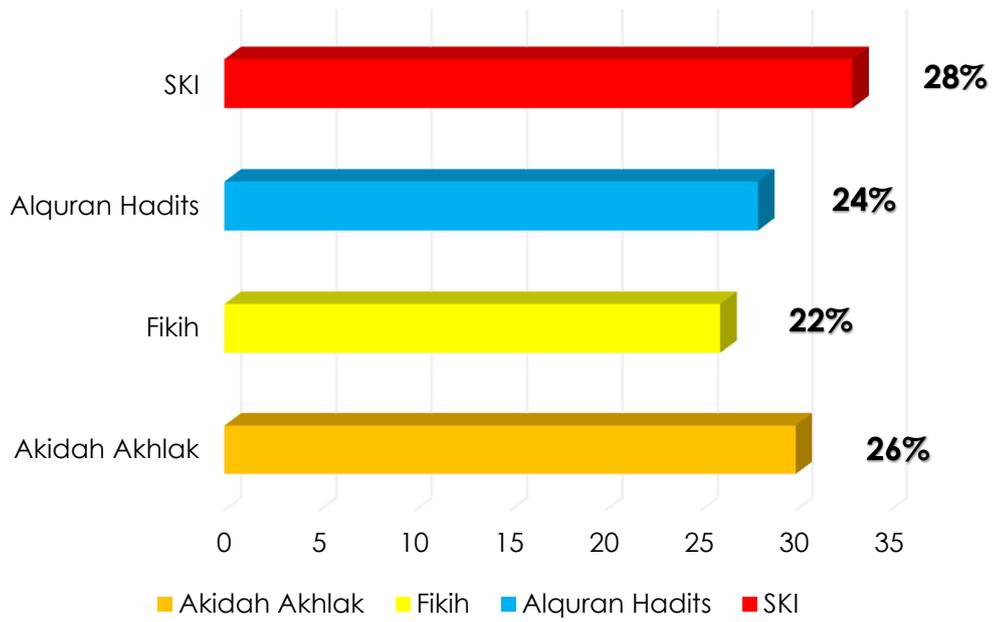
■ Laki-laki ■ Perempuan



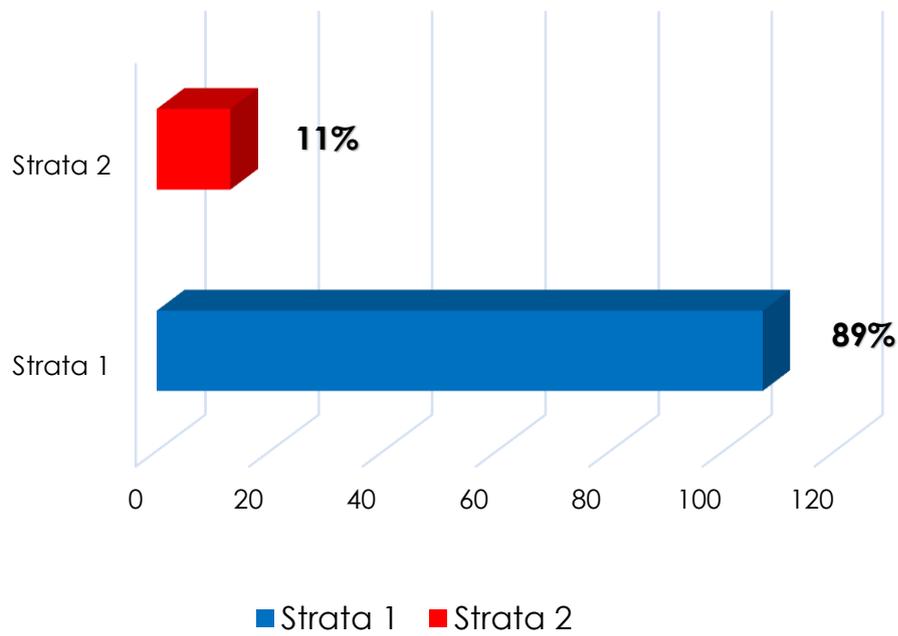
Status Kepegawaian



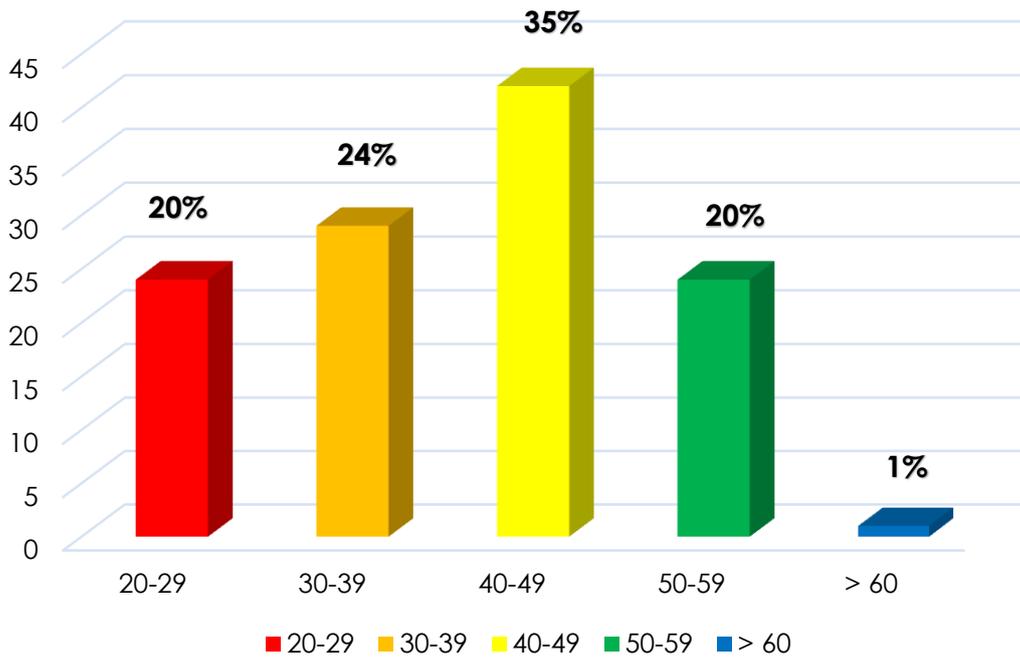
Mapel



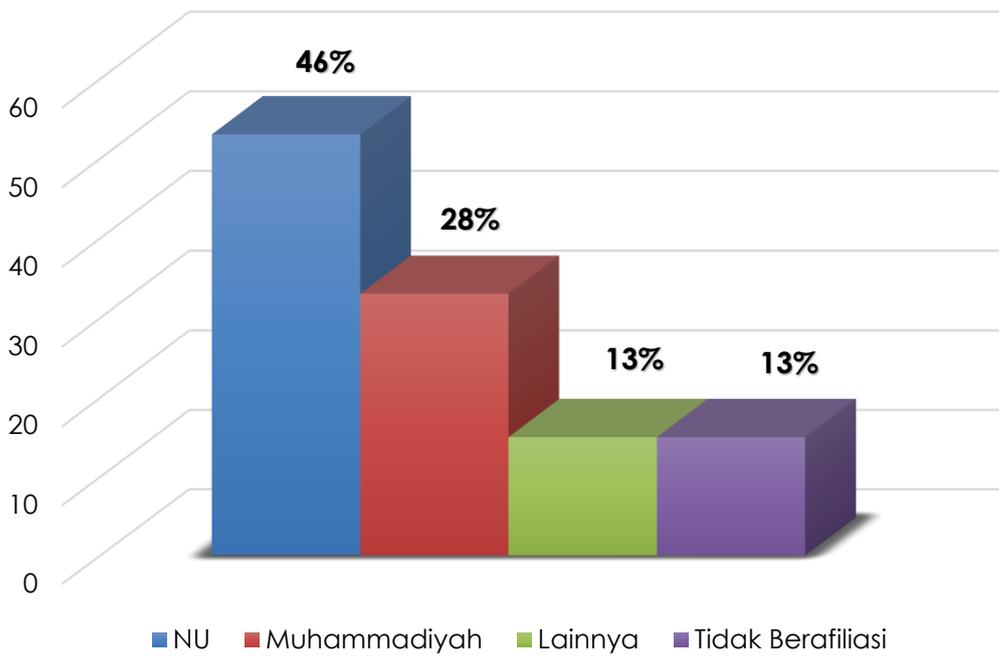
Pendidikan Terakhir



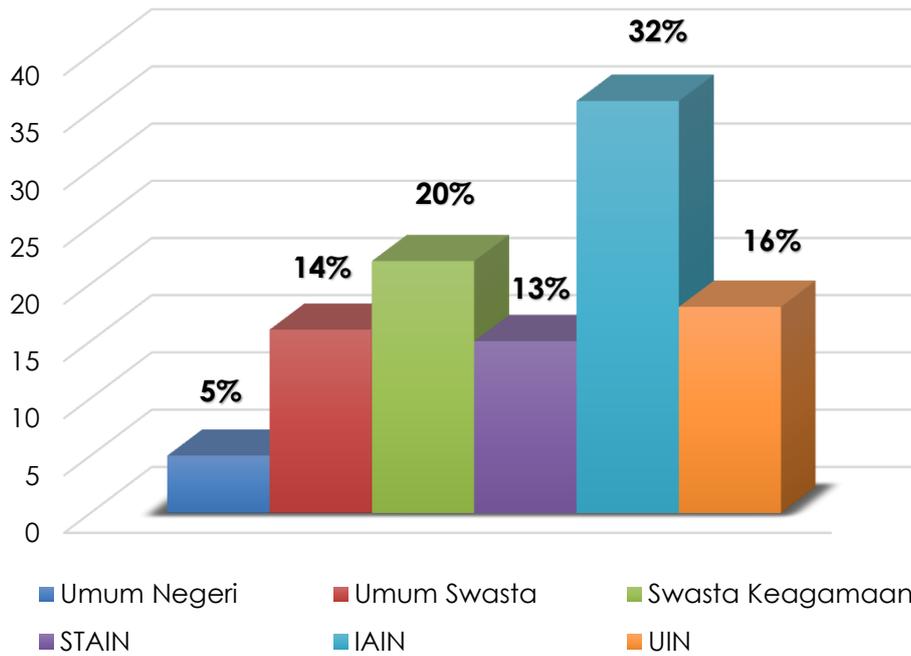
Rentang Usia



Afiliasi Organisasi

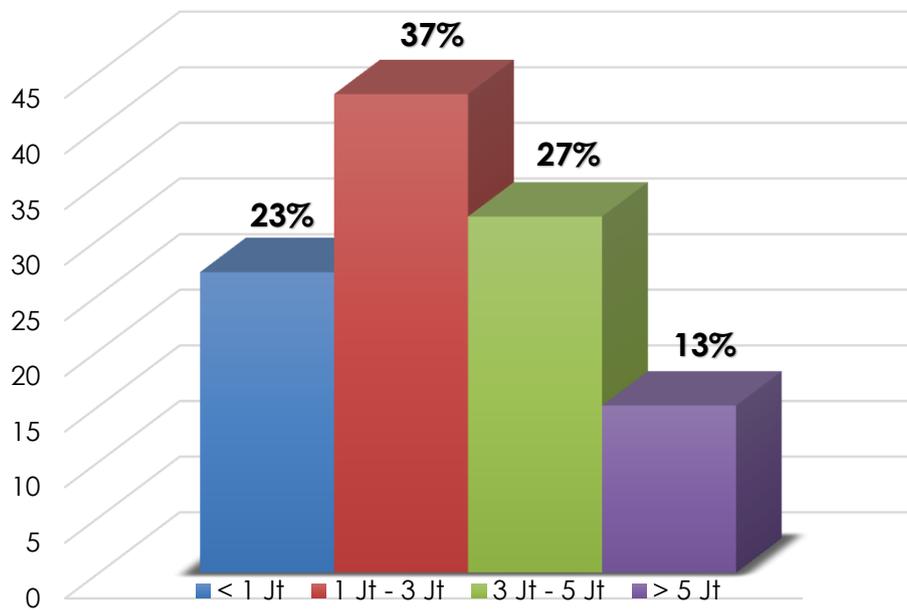


Latar Belakang Pendidikan

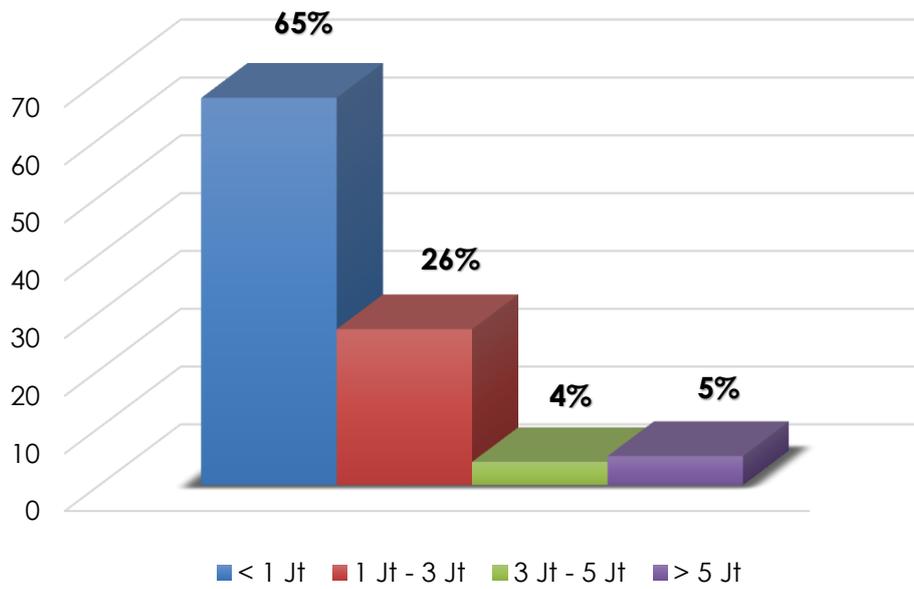


STAIN/IAIN/UIN (69 = 61%)

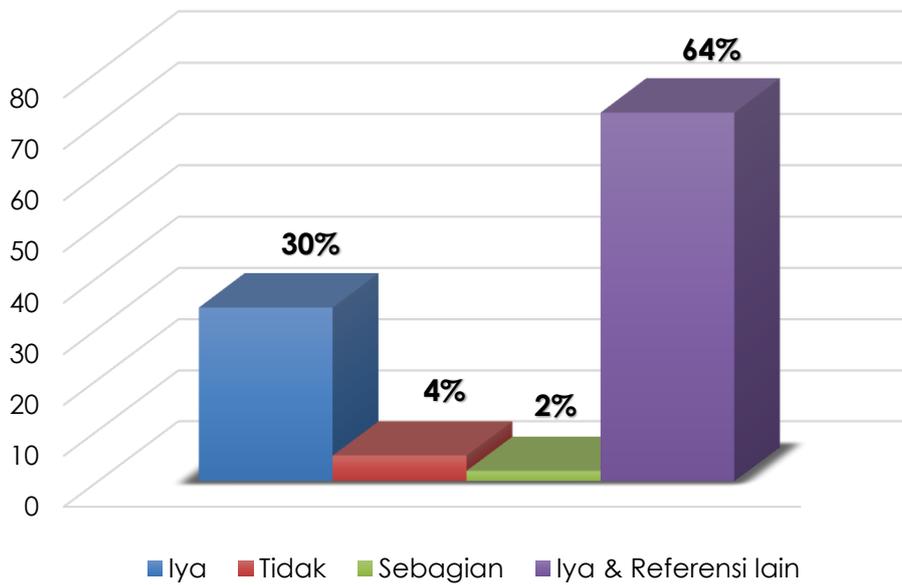
Penghasilan Sebagai Guru



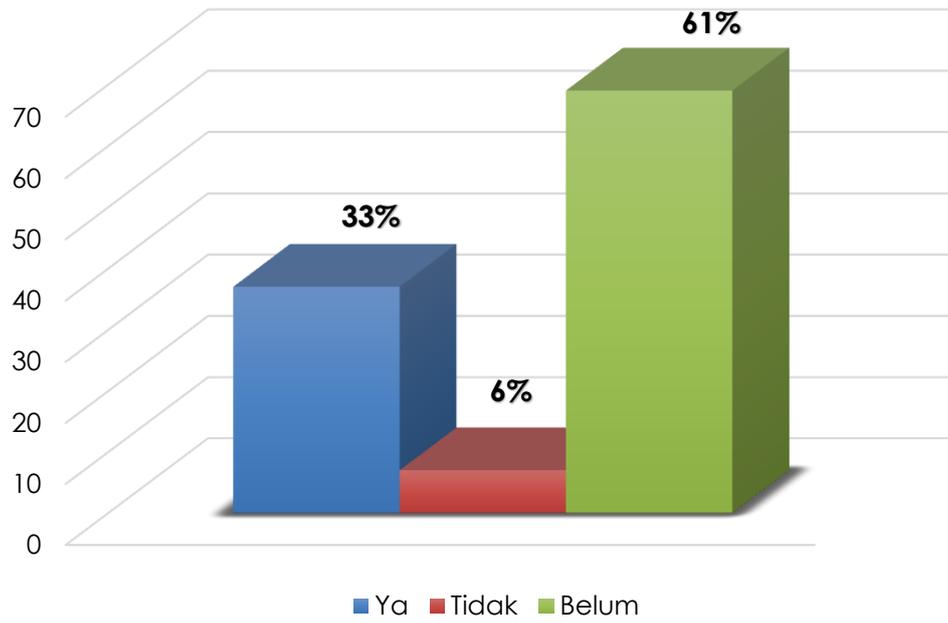
Penghasilan Diluar Profesi Guru



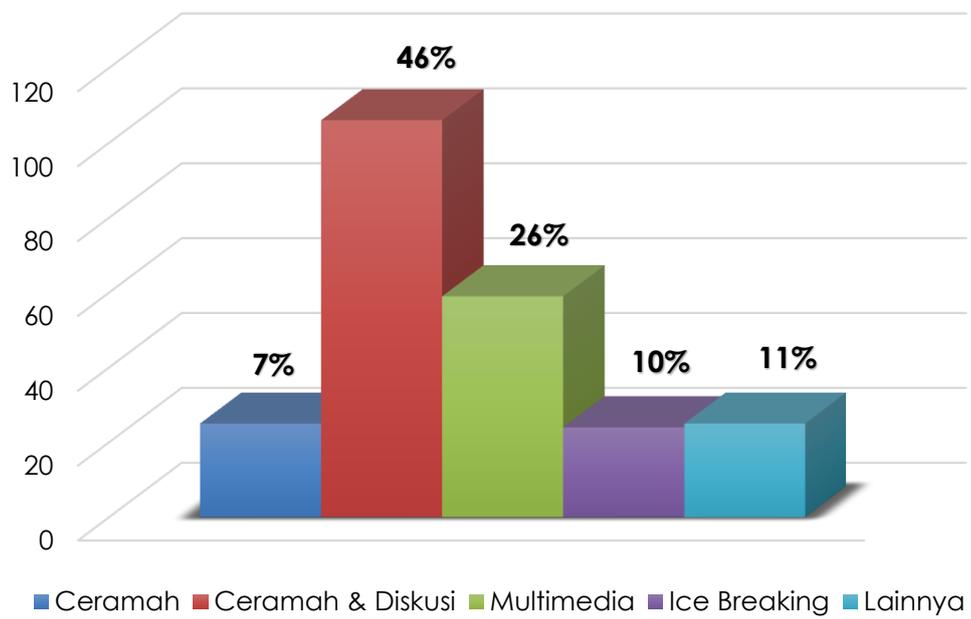
Penggunaan Bahan Ajar PAI Dari Kemenag



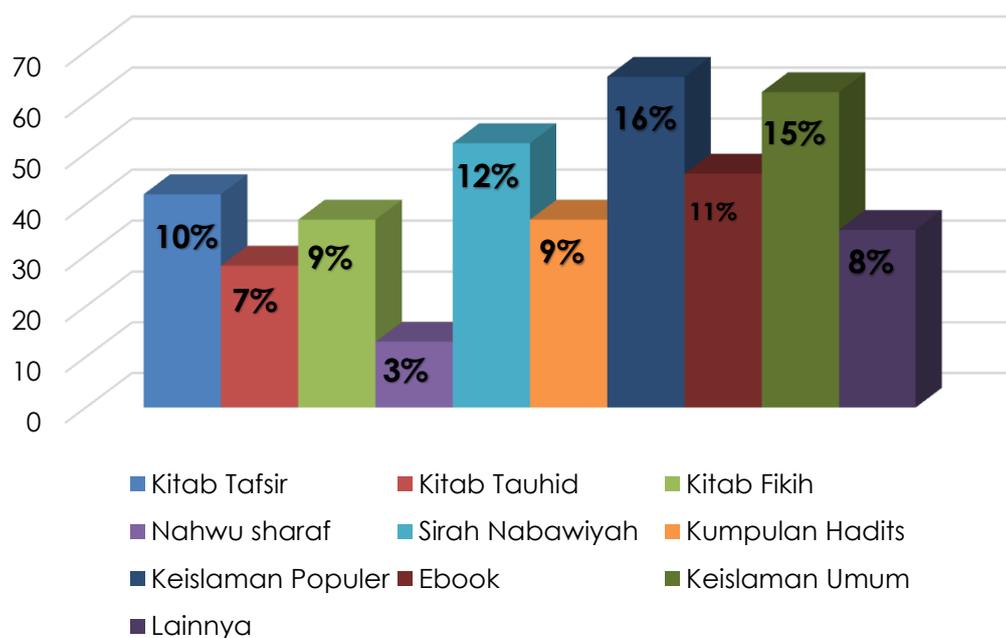
Kesesuaian Buku Ajar



Metode Pembelajaran



Referensi kitab & buku suplemen



3. Wawancara Mendalam dan Pengamatan

Wawancara mendalam (*indepth Interview*) disertai pengamatan dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang perspektif, penggunaan, apropriasi, modifikasi dan inovasi guru terhadap buku ajar, dan tentang spektrum ideologis guru. Selain bertujuan menggali informasi yang personal dan dalam, wawancara mendalam juga berfungsi untuk mengungkap narasi biografis informan serta menyingkap informasi sensitif yang kurang berhasil dieksplorasi ketika FGD. Pemahaman masing-masing informan dieksplorasi melalui disposisi psikososialnya yang merupakan perpaduan dinamis dari riwayat kehidupan pribadi, dan hasil interaksi sosial yang dijalinnya dalam keluarga maupun lingkungan yang lebih luas, seperti sekolah, kelompok pengajian, media dan jejaring yang diikuti, maupun masyarakat.

4. Diskusi Kelompok Terpumpun (*Focused Group Discussion*)

Focused Group Discussion (FGD) dilakukan untuk memperoleh keragaman perspektif guru, untuk saling-melengkapi dengan data wawancara mendalam. Setiap FGD melibatkan 6-8 informan guru sesuai ketersediaan para guru di masing-masing ke-5 kota kabupaten. FGD rata-rata berlangsung selama sekitar 3 jam, dipandu oleh peneliti sebagai fasilitator diskusi dengan dibantu seorang *notetaker* yang merekam dan mencatat isi dan dinamika proses diskusi. Sebagaimana wawancara mendalam, FGD dilakukan dengan memastikan keterwakilan madrasah negeri-swasta, keempat mata pelajaran, dan jenis kelamin.

C. PETA IDEOLOGI BUKU AJAR PAI MADRASAH ALIYAH

Tidak mudah menentukan apakah sebuah buku ajar PAI memiliki kecenderungan inklusif atau eksklusif, toleran atau intoleran, bahkan tekstual atau kontekstual. Karena buku ajar PAI yang digunakan di MA adalah keluaran pemerintah dalam hal ini Kemenag RI, diyakini bahwa kecil kemungkinan ajaran-ajaran radikalisme dan terorisme masuk ke dalam buku ajar PAI. Untuk menyederhanakan pemetaan muatan buku ajar, penelitian ini menggunakan tiga spektrum ideologis utama yang telah dipaparkan pada definisi konseptual di atas, yaitu Konservatif (tekstual, eksklusif dan intoleran), Moderat (kontekstual, inklusif, dan toleran) dan Progresif (humanis, pluralis dan kosmopolit). Untuk mendapatkan muatan ideologi, digunakan analisis isi tematik berdasarkan beberapa kata kunci: *jihad, khilafah, kafir, dosa, bid'ah, perang, pembunuhan, musyrik, bughot, toleransi, demokrasi*, dll. Berdasarkan analisis isi, maka temuan dalam analisis buku ajar menunjukkan adanya fragmentasi orientasi ideologis buku ajar dan adanya ambivalensi ideologis dikarenakan kegagalan atau ketidak-tuntasan melakukan kontekstualisasi doktrin agama dalam buku teks yang akan dilulus sebagai berikut.

1. Fragmentasi dan Keragaman Ideologi

Pada dasarnya, muatan materi buku ajar PAI Madrasah Aliyah memiliki keberpihakan kuat pada moderatisme Islam dan pemahaman keislaman yang bercorak kontekstual. Faktor utama moderatisme tersebut adalah komitmen pemerintah terutama Kemenag dalam mengokohkan Islam moderat di Indonesia, selain itu juga semangat Kurikulum 2013 yang memiliki semangat pembelajaran kontekstual yang memiliki tujuan membangun *higher order of thinking* (berpikir tingkat tinggi) dalam memahami agama. Dalam tinjauan orientasi pedagogis, kecenderungan dimensi kognitif buku ajar PAI Kemenag masih jauh lebih kuat daripada dimensi afektif dan perilaku atau psikomotoriknya. Meskipun buku ajar PAI memiliki orientasi penguatan karakter moderat, bahkan cenderung transformatif, akan tetapi kontekstualisasi akidah masih jatuh pada konservatisme. Proyek pembelajaran kontekstual K13 yang belum tuntas, menjadikan materi buku PAI Kemenag terfragmentasi dalam ideologi yang beragam. Akibatnya dalam buku ajar PAI ditemukan muatan ideologi yang mengarah pada benih-benih eksklusifisme, sektarianisme, pemahaman yang tekstual, dan intoleran yang mengarah pada konservatisme akidah.

a. Potensi Eksklusifisme

Pada buku Al-Qur'an Hadis untuk siswa MA kelas X, XI, dan XII memuat beberapa kata kunci yang mengandung pengertian kerusakan secara jasmani dan rohani. Adapun beberapa kata kunci yang mengandung makna kerusakan secara rohani adalah: kafir, musyrik, bid'ah, Yahudi dan Nasrani. Sementara itu, yang termasuk kerusakan secara jasmani adalah kata kunci: pembunuhan, korupsi, narkoba, dan homoseksual. Pembahasan

tentang kata kafir dan musyrik ditemukan pada bab 4 kelas X tentang “Pokok-pokok Isi Kitab-Ku”. Dalam bab ini dijelaskan sebagai berikut:

“Setiap Muslim wajib meyakini ke-Maha Esa-an Allah. Orang yang tidak meyakini ke-Maha Esa-an Allah Swt. berarti ia kafir, dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah Swt, dinamakan musyrik” (h. 50).

Bab ini mengarahkan kepada siswa agar menghindari perbuatan kerusakan yang terjadi di muka bumi. Selain itu, mereka juga diarahkan untuk menghindari berteman dan berinteraksi dengan orang-orang kafir dan musyrik, agar tidak terpapar dan dipengaruhi oleh perbuatan mereka. Adapun yang dimaksud dengan kafir di sini adalah orang yang tidak meyakini ke-Maha Esa-an Allah Swt, sedangkan kata musyrik dipahami sebagai meyakini adanya Tuhan selain Allah Swt.

Lebih lanjut, pembahasan tentang orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang musyrik ditemukan pada bab 2 tentang “Menghadapi Cobaan dengan Senyuman”, dalam buku Al-Qur’an Hadis untuk siswa MA kelas XII, misalnya pada teks berikut:

“Selain itu, Allah juga akan menguji keimanan umat Islam dengan perantaraan orang lain dari golongan Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik yang melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap al-Quran, kepribadian Nabi, dan nilai-nilai ajaran Islam secara umum, yang sampai saat ini kita merasakannya” (h.35).

Buku ini menempatkan mereka sebagai ancaman bagi umat Islam, karena perbuatan sehari-hari mereka cenderung merusak umat Islam secara rohani. Terkait dengan hal ini, penjelasan buku ini mengarahkan kepada siswa untuk melakukan dua hal yang mengarah pada paham eksklusivisme. *Pertama*, mereka diarahkan untuk bersabar dan tetap tersenyum ketika berinteraksi sosial dengan mereka. *Kedua*, para siswa diarahkan untuk waspada pada saat bekerjasama dan bermuamalah dengan mereka. Jangan sampai mereka dijadikan sahabat dan teman dekat, agar tidak terpapar dipengaruhi oleh kebiasaan mereka berbuat kerusakan secara rohani.

Adapun pembahasan tentang *syirk* dan *bid’ah* ditemukan pada bab 3 tentang “Menjaga Kelestarian Alam”, dalam buku Al-Qur’an Hadis untuk siswa MA kelas XII. Pada bab ini dibahas bahwa perbuatan *syirk* dan *bid’ah* yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan musyrik adalah contoh perbuatan yang mengandung makna kerusakan (*fasad*) di muka bumi ini. Oleh karena itu, Allah Swt. Melarang dua jenis perbuatan tersebut. Perbuatan lain yang disetarakan dengan *syirk* dan *bid’ah* adalah perbuatan manusia di muka bumi yang mengandung kerusakan secara fisik. Yang termasuk dengan perbuatan ini adalah:

“pembunuhan, perampasan hak milik dengan pencurian atau korupsi, merusak akal dengan minuman beralkohol dan narkoba, merusak keturunan dengan zina, perilaku homoseksual dan lesbian termasuk merusak sumber kehidupan

(pertanian, peternakan, perkebunan), mengeksploitasi tambang dan sumber daya alam secara berlebihan dan lain sebagainya" (h. 51).

Pembahasan yang dijelaskan pada beberapa alenia di atas menunjukkan bahwa buku Al-Qur'an Hadis untuk siswa MA kelas X, XI, dan XII mengandung muatan ideologi yang potensial mengarahkan para siswa bersikap eksklusif dan intoleran terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dan menyamaratakan dinatara orang-orang yang dianggap kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang pro-LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Trans Gender).

Sikap eksklusif dalam buku ajar PAI ditujukan pada pergaulan antar manusia dan hubungan dengan Negara. Dalam buku ajar Akidah Akhlak Bab 9 kelas XII tentang Meneladani Sifat Utama Ibnu Rusyd dan Muhammad Iqbal, dipaparkan tujuan mengenalkan tokoh klasik dan modern Islam yang menjadi ilmuwan hebat. Akan tetapi, Iqbal dipersepsikan sebagai tokoh yang anti-Barat karena Barat mengajarkan materialisme dan meninggalkan agama. Menurut Iqbal hal yang dapat diambil dari Barat hanya kemajuan ilmu pengetahuannya saja, sehingga nampak eksklusif terhadap Barat. Iqbal berpandangan bahwa nasionalisme yang dibentuk oleh Barat cenderung bersifat materialisme dan atheisme. Pendapat Iqbal saat itu relevan dengan konteks zamannya dimana gerakan nasionalisme di India digerakkan oleh perjuangan dekolonialisme dari Inggris, dan sekaligus diwarnai oleh konflik antara Hindu dan Islam. Umat Islam India kelak membentuk negara tersendiri yaitu negara Pakistan. Dalam konteks humanism global saat ini, kutipan terhadap Iqbal dengan tafsir demikian dapat menyemaikan benih-benih anti-humanisme dan anti-nasionalisme dalam kebangsaan global yang majemuk (h. 194-195).

Pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas XII bab 4 "Membiasakan Adab Pergaulan Dalam Islam" seakan-akan mengajarkan kebaikan untuk membentengi moral dari dunia luar. Tetapi materi ini tanpa disadari telah mengarahkan siswa pada sikap eksklusif-diskriminatif ketika menjelaskan cara mencari teman sebaya yang baik menurut Islam dengan mengutip hadits berikut: "*Seseorang bergantung pada agama temannya, perhatikan siapa yang dijadikan teman*". (HR. Ahmad).

Setelah mengutip hadits, dijelaskan kriteria dalam memilih teman, yaitu: *pertama* yaitu cerdas, dijelaskan bahwa "dalam Islam dianjurkan untuk mencari teman yang cerdas bukan yang bodoh atau dungu". *Kedua*, memiliki akhlak yang baik dengan mengutip ayat tanpa konteks:

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka." (QS. Al-Mujadilah (58):14-15).

Ketiga, bukan orang fasik, dalam buku ini dinyatakan “Banyak sekali pemuda yang awalnya memiliki perangai baik, taat beribadah, berbakti kepada orang tua, rajin belajar dan memiliki prestasi, namun setelah bergaul dengan si A misalnya seluruhnya berubah total. Pertanyaannya adalah dari mana perubahan itu terjadi? Tentunya dari sahabatnya tadi.” *Keempat*, bukan orang yang rakus dengan mengutip Abu Sulaiman al-Darani: jangan bergaul kecuali sama dua orang: penasehat dan pengamal shaleh (h. 73-74).

Pelajaran ini, jika tidak dijelaskan secara memadai menjadikan anak didik akan eksklusif cenderung pilih-pilih teman, menumbuhkan benih-benih diskriminasi, tertutup dan curiga dengan orang lain.

b. Potensi Fatalisme: Kegagalan Transformasi Akidah

Dalam buku ajar Akidah-Akhlak kelas X, materi akidah disajikan dalam Bab I, Bab II, Bab IX dan Bab X. Akidah dijelaskan dengan mengutip pemikiran Muhammad Abduh dan Ibnu Khaldun. Berdasarkan argumen dua tokoh ini, “ilmu akidah” dijelaskan sebagai:

“ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun Iman dan Islam dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan” (h.5).

Selanjutnya pada Bab 2 “Ayo Bertauhid”, dijelaskan Islam sebagai agama Tauhid dan umat Islam jangan sampai mencampuradukkan akidah dengan praktik-praktik kemusyrikan dan syirik (h. 13). Dalam bab IX, kelas X ketika menjelaskan perbuatan syirik, *syirik Asghar (syirk khafi)* dinyatakan sebagai perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Swt. Misalnya, pernyataan seseorang: “Jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati.” Pernyataan seperti dianggap mengandung pengakuan ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Swt. Menurut buku ini yang benar adalah: “seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter itu, saya pasti akan mati.” Penjelasan teologis seperti ini problematis, karena peran dokter dianggap tidak peran Allah, padahal Allah bergerak berdasarkan *sunnatullah* (hukum alam) (Syahrur, 2007).

Dalam materi akidah, kecenderungan kegagalan kontekstualisasi ditemukan dalam bab 1 tentang “Nilai tujuh *Al-Asma Al-Husna: al-Gaffar, al-Razzaq, al-Malik, al-Hasib, al-Hadi, al-Khaliq dan al-Hakim*. Sebagai contoh misalnya ketika menjelaskan *Al-Razzaq* (Yang Maha Memberi Rezeki), dimaknai menjadi “Setiap orang sudah dijamin rezekinya”. Pemaknaan ini secara tidak langsung mengarah pada sikap pasrah kepada Tuhan. *Al-Malik* (Yang Maha Merajai) dimanifestasikan pada makna-makna seperti: manusia memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap

sesuatu, pengendalian nafsu, dan bersyukur terhadap nikmat Allah. Pemaknaan semacam ini tidak produktif, lemah, pasif, tidak mengajak peserta didik mensifati Allah, sehingga berimplikasi pada sikap seperti merajai dunia dan menguasai kehidupan (h.7). Pemaknaan yang serupa juga ditemukan dalam Buku Siswa Kelas X, bab X tentang “Indahnya Asmaul Husna: *al-Kariim, al-Mukmin, al-Wakil, al-Matin, al-Jami’, al-‘Adlu, an-Nafi, al-Basit, al-Hafidz, dan al-Akhir.*” Misalnya *al-Hafidz* yang dimaknai sebagai “Allah memelihara dan menjaga kita dalam segala aspek kehidupan.” Penjelasan tersebut sudah benar, tetapi tidak memiliki daya transformasi sosial misalnya meniru akhlak Tuhan dengan “menjaga keamanan lingkungan”. Pemaknaan *al-Hasib* (Maha Menghitung) sebatas “merasa dihitung oleh Allah”, dan “muhasabah diri”, belum sampai pada pemaknaan misalnya teliti, cermat, dan penuh perhitungan dalam kehidupan (h.8). Akhlak Tuhan (*asmaul husna*) masih dipahami secara teosentris, belum antroposentris (akidah humanis-transformatif).

Spirit saintifik kurikulum 2013 belum terlihat di materi teologi, bahwa teologi Islam secara teoritis, tak dapat dibuktikan secara “ilmiah” maupun filosofis. Teologi belum menjadi ide nyata yang mampu membangkitkan dan menuntun umat dalam mengarungi realitas kehidupan (Hanafi, 2010). Teologi belum berfungsi sebagai pembebas dan penggerak manusia ke arah kesadaran untuk transformasi sosial kepada isu-isu riil di tengah masyarakat (Engineer, 2009). Di satu sisi, aspek teologis ketika menjelaskan *asmaul husna* dan *syirk* masih terjebak dalam pandangan yang fatalistis (model jabariah) di mana berbagai wilayah saintifik (IPTEKS) dan fenomena alam lebih dikarenakan oleh kehendak Tuhan semata atau sebagai suratan takdir.

Buku ajar Fiqih XI menjelaskan tahapan tindakan hukum *bughot* (pembangkang pemerintah), namun problemnya tidak menjelaskan konteks *bughot* hari ini (h.48-49). Orientasi tekstual juga dapat ditemukan dalam buku ajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) ketika menjelaskan definisi “Kejahiliah Arab” secara tekstual tanpa mengkaitkannya dengan konteks kekinian. Tekstualitas semacam ini beresiko membawa peserta didik luput memahami pesan utama buku SKI tentang proses dakwah dimana terjadi benturan antara antara misi kenabian dan kebudayaan pra-Kenabian. Definisi konseptual “jahiliyah” hanya ditunjukkan dalam bentuk “menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan logam.” Pemahaman jahiliyah yang sangat berorientasi pada “menyembah patung” akan menggiring wawasan keagamaan tentang doktrin teologi. Apalagi setiap agama yang saat ini eksis memiliki latar teologi dan ritual yang berbeda-beda.

Spirit pendekatan saintifik-kontekstual dalam K13 ternyata cenderung tenggelam oleh teologi konservatisme dalam buku ajar PAI Kemenag. Jika Abdullah Saeed (2006) membagi corak pemahaman agama menjadi tiga yaitu: tekstualis, semi-tekstualis dan kontekstualis, maka di dalam buku ini bisa dikatakan lebih mengarah pada penafsiran akidah "semi-kontekstual". Kegagalan atau kalambanan kontekstualisasi ini berakibat pada pemaknaan teologis yang masih bersifat teosentris yang berorientasi pada Tuhan, belum antroposentris yang berorientasi pada kemanusiaan (humanis). Hal ini dikarenakan penulis Buku Ajar ingin mengarahkan pemahaman akidah ke arah kontekstual, tetapi masih terjebak kepada pemahaman akidah yang normatif-trensendentalis. Berdasarkan orientasi pedagogik, materi akidah masih bersifat kognitif, walaupun dalam tujuan pembelajaran diarahkan pada implementasi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, kurikulum tidak sekadar memahami akidah, dalam "portofolio" sudah mengarah pada "berpikir dan mengamati fenomena kehidupan sehari-hari" sebagaimana semangat K13.

c. Potensi Fanatisme dan Sektarianisme

Buku Akidah Akhlak kelas XI bab II tentang "Memahami Aliran-Aliran Ilmu Kalam dan Tokoh-Tokohnya" mengajarkan pokok-pokok aliran-aliran ilmu kalam seperti Khawarij, Murjiah, Syi'ah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, al-Maturidiyah, Mu'tazilah, Aliran Ahlu Sunnah Wal Jamaah/ Sunni (h. 21-46). Tujuan memahami materi ini, seperti diilustrasikan melalui gambar "ayo mengamati" adalah untuk memperkenalkan perbedaan sebagaimana kutipan berikut:

"Pokok-pokok aliran dalam ilmu kalam sudah ada sejak lama. Munculnya aliran-aliran sekaligus menggambarkan bahwa kelompok-kelompok di masyarakat pasti ada. Artinya perbedaan yang terjadi di masyarakat merupakan suatu bentuk keniscayaan. Hal terpenting adalah bagaimana merajut perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang kuat, bukan sebaliknya perbedaan itu justru dijadikan pemicu untuk saling bermusuhan. Allah sengaja membuat sesuatu beragam, tidak seragam. Semua itu agar saling mengenal, saling memahami, saling menghormati dan menguatkan. Tidak justru saling bercerai berai. Oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan agar perbedaan itu bisa menjadi sumber kekuatan untuk kebaikan bersama?"

Selain itu, materi kalam klasik dalam buku ajar Akidah Akhlak masih berbicara dosa besar, kafir, dzalim, dan konflik golongan pada berabad-abad yang lalu, masih jauh dengan kalam modern.² Padahal pemikiran *Kalam* klasik (Akidah) Islam dipicu

² Kalam modern pada dasarnya adalah persoalan bagaimana manusia Muslim yang hidup di era kontemporer sekarang ini memecahkan persoalan keterhubungan, keterpisahan, keterkaitan dan dialektika antara *nass* atau teks dan realitas. Masalah-masalah kemanusiaan yang fundamental, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, keterbelakangan ekonomi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut M. Amin Abdullah,

oleh peristiwa sosial-politik, dimana status pendosa disandangkan pada pelaku kasus pembunuhan sesama Muslim. *Kafir, murtad, munafiq, fasiq, dzallun* (sesat), *manzilah baina al-manzilatain* adalah istilah-istilah atau terminologi keislaman yang pengertiannya juga sarat dan lekat dengan terminologi politis. Sajian materi pada buku Akidah Akhlak masih berkaitan erat dengan *Ushul al-madzhab* (dasar-dasar, sejarah dan kepentingan kelompok-kelompok Islam), dari pada *Ushul al-din* (seperangkat nilai-nilai fundamental keagamaan). Jika melihat materi yang disajikan dalam bab II kelas XI, penjelasan aliran-aliran kalam tersebut lebih bernuansa sejarah konflik dan politik perpecahan umat Islam.

Dalam Bab I tentang “Memahami Ilmu Kalam” dijelaskan fungsi ilmu kalam yang sebatas untuk menjelaskan, memperkuat dan membela akidah Islam dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (h.10). Aspek-aspek Ilmu Kalam sebatas membahas keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan keesaan dalam beribadah kepadanya. Dari segi muatan isi, rumusan-rumusan Kalam klasik yang disajikan bersifat spekulatif, ideologis, bahkan seringkali berkonotasi dan bermuatan politis. Tujuan pembelajaran “memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran” (h.12) tidak sepadan dengan muatan yang menyajikan sejarah konflik aliran Islam. Akan tetapi, materi terbanyak dialokasikan untuk mengajarkan toleransi internal umat Islam, sedangkan materi lainnya justru dapat menjadi pintu masuk untuk mengajarkan fanatisme. Kalam dalam tradisi keilmuan Islam sangat sarat diwarnai kepentingan politik, yang saling menegaskan pendapat antar kelompok (*firqah-firqah*) yang saling curiga dan saling *truth claim*.

Dalam buku ajar ini, materi akidah nampaknya belum sejalan dengan semangat K13 dengan pendekatan saintifik. Seharusnya dengan pendekatan saintifik guru PAI dan siswa diharapkan menemukan skema dan pola-pola objektif dari berbagai agama yang berbeda-beda. *Output* dari pendekatan saintifik adalah diperoleh pemahaman bahwa tidak ada agama yang sama. Semua agama adalah unik dan berbeda. Pengamatan dan penglihatan agama secara objektif-saintifik ini diperlukan manusia beragama agar tidak mudah terjebak dan terbelenggu dalam egoisme sektarian dan primordialisme

setidaknya ada sembilan tema atau topik besar yang perlu dibahas oleh perkuliahan dan pengajaran *Kalam Sosial* atau *Fikih Sosial* era kontemporer, yaitu 1) *Nass* dan penafsiran atas *nass*, 2. Harkat dan martabat kemanusiaan (*al-Karamah al-Insaniyyah*), 3) Sains modern, 4) Ijtihad kontemporer, 5) Fikih wanita (*Fiqh al-nisa' al-mu'asir*), 6) Dialog antar budaya dan agama (*al-Hiwar*), 7) Fikih Sosial-politik, 8) Fikih Universal, dan 9) Fikih Kewargaan. Lihat M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

keagamaan yang akut. Menurut Amin Abdullah (2016:37-39), hanya pendekatan agamis-filosofis yang mendasar yang dapat menjernihkan akidah politis yang eksklusif (*having a religion*) ke akidah murni yang inklusif (*being religious*).

d. Pesan Ekstremisme

Muatan materi yang mengarah pada ekstremisme ditemukan pada buku ajar SKI kelas X Bab V yang berjudul "Proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah". Ajaran kekerasan digambarkan pada sejarah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Abu Abbas kepada Bani Umayyah. Buku SKI menuliskan dengan jelas bahwa:

"Gelar as-Saffah yang diberikan kepada Abu Abbas disebabkan karena terkenal pemberani dalam berperang menghadapi lawan politiknya. Sikap tegas dan berani membuahkan hasil besar bagi keturunan Hasyim dengan berdirinya Bani Abbasiyah" (h. 46).

Sikap yang dilakukan oleh Abu Abbas dalam menghadapi lawan politiknya dengan menggunakan kekerasan berupa perang, cenderung mempromosikan spektrum ideologi intoleran-ekstremisme. Jalan kekerasan yang ditempuh Abu Abbas diglorifikasi sebagai heroisme atau kepahlawanan sebagai berikut:

"Abu Abbas diberi gelar as-Saffah karena dia Pemberani karena mau mengarahkan pedangnya kepada lawan politiknya. Semua lawan politiknya diperangi dan di kejar-kejar, diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru direbut dari Bani Umayyah!" (hal 48).

Penegasan penulisan "mengarahkan pedangnya kepada lawan politiknya" memunculkan persepsi kepada pembaca (baca: siswa) bahwa merebut kekuasaan dengan jalan kekerasan diperbolehkan dan wajar dalam Islam, demikian juga dengan pengusiran dan inkuisisi. Pesan ini secara psikologis dapat memunculkan sikap dan perilaku ekstremisme dalam bidang agama maupun politik.

2. Ambivalensi dan Kegagalan Kontekstualisasi

Ambivalensi merupakan suatu keadaan dimana secara bersamaan terjadi pertentangan atau kontradiksi ide-ide maupun sikap-sikap terhadap satu hal. Merujuk pada Appleby (2000), ambivalensi manusia terhadap gagasan dan pengalaman keagamaan yang sakral berakibat pada munculnya keragaman internal di dalam satu agama itu sendiri, yang kerap kontra-produktif. Yang dimaksud "ambivalensi spektrum ideologi" dalam penelitian ini, adalah situasi dimana terdapat pesan yang saling bertentangan secara bersamaan diantara tema-tema dalam muatan buku ajar. Dalam buku ajar PAI juga ditemukan adanya stagnasi (kemandegan) dan kegagalan menyajikan materi ajar studi keislaman yang bercorak moderat-kontekstual, sehingga materi ajar masih jatuh pada pemahaman konservatif, bahkan ekstrem. Akibat proyek pembelajaran kontekstual K13 yang belum sempurna, maka tidak

mengherankan bila ditemukan orientasi ideologi yang ambivalen dalam satu topik asmaul husna, khilafah, jihad, dan *qital*.

Secara umum, temuan materi akidah khususnya asmaul husna dalam buku ajar Akidah Akhlak masih bersifat "semi-kontekstual" sehingga masih jatuh pada konservatisme sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam Buku Ajar Akidah Akhlak kelas XII bab Asmaul Husna ditemukan ambivalensi, yakni kecenderungan mendua atau inkonsistensi ideologis, antara konservatif-tekstual dan progresif-humanis dalam satu tema. Misalnya ketika menjelaskan *Al-Razzaq* yang bermakna 'maha memberi rezeki' dimanifestasikan menjadi: a) setiap orang sudah dijamin rezekinya; b) berusaha secara maksimal dan *qona'ah*; dan c) mengantarkan rezeki kepada orang lain (h.7). Pemaknaan poin a nampak konservatif, karena mengandung sikap pasif dan pasrah bahwa rezeki dari Allah, namun cenderung progresif-humanis karena mampu mentransformasikan *Ar-Razak* dalam kehidupan yang dinamis dengan membantu sesama (mengantarkan rezeki orang lain). Ambivalensi juga ditemukan pada penjelasan *Al-Hadi*, yang berarti yang maha memberikan petunjuk. Makna *Al-Hadi* mengandung tiga spektrum ideologi sekaligus, yaitu konservatif, moderat sekaligus progresif, yaitu: 1) "meyakini bahwa petunjuk Allah swt banyak sekali" cenderung konservatif karena orientasi masih teosentris; 2) "meyakini bahwa agama merupakan petunjuk atau hidayah tertinggi melalui panca indra, akal, agama dan naluri" di sini nampak moderat karena petunjuk yang dimaksud lebih kontekstual yaitu panca indera; dan 3) "memberikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih" mengandung dimensi transformasi ajaran menjadi aktual dalam kehidupan (h.12).

Selanjutnya, ambivalensi ideologis, dapat dilihat pada pembahasan khilafah dan politik Islam yang selalu mengundang kontroversi. Buku Fiqih (edisi 2016) untuk Madrasah Aliyah membahas dua topik yang untuk konteks Indonesia cukup sensitif: "Khilafah (Pemerintahan dalam Islam)" dan "Jihad dalam Islam". Dalam buku tersebut, terlihat upaya untuk melakukan kontekstualisasi dua topik itu dalam situasi kekinian dan keindonesiaan. Rupanya upaya kontekstualisasi itu tidak cukup berhasil menyangkut tema jihad, dan terlihat sulit untuk tema khilafah. Dalam topik khilafah, meskipun ada upaya memperbandingkan sejarah kekhalifahan dengan sejarah kekinian bangsa lain, seperti konsep *trias politica*-nya Montesque dan konstitusi Amerika serta membagi politik Islam menjadi *siyasah syar'iyah* dan *siyasah dusturiyah*, namun kesimpulannya bahwa —merujuk kepada pendapat *jumhur ulama*— hukum membentuk khilafah adalah *fardlu kifayah* (h.12). Dalam buku tersebut, terdapat dua pertanyaan dalam Uji Kompetensi yang apabila dipahami teksnya secara terpisah memiliki nuansa berbeda. *Pertama*, pertanyaan, "Jelaskan dasar-dasar khilafah beserta dasar-dasar naqlinya!" *Kedua*,

pertanyaan, “Dalam kenyataan, praktik pemerintahan di dunia ini bermacam-macam, mengapa bisa terjadi demikian?” (h.28-29). Pertanyaan pertama seperti memberikan legitimasi bahwa khilafah adalah konsep yang harus diterima dan masalahnya adalah bagaimana mencari dalil *aqli* dan *naqli*. Sedangkan pertanyaan kedua, khilafah adalah salah satu pilihan dari beragam kemungkinan bentuk pemerintahan. Pernyataan bahwa hukum membentuk khilafah adalah *fardlu kifayah* jika dilepaskan dari konteks dan pertanyaan-pertanyaan lain bisa mengundang kontroversi.. Poin yang mengundang kontroversi dalam literatur Fiqih di Madrasah Aliyah mungkin juga disumbang oleh pemilihan judul bab dan fokus kurikulum, yaitu “Khilafah (Pemerintahan dalam Islam)”. Buku Fiqih kelas XII menulis bab tersebut “Ketentuan Islam tentang Khilafah”. Artinya, Kurikulum 2013 memang menonjolkan aspek *khilafah*-nya sebagai topik bahasan utama.

Selain khilafah, ambivalensi juga ditemukan dalam pemaknaan jihad. Dalam buku ajar Fiqih kelas XII penjelasan makna jihad memiliki makna tekstual-konservatif, sekaligus kontekstual-progresif. Kecenderungan tekstual-konservatif ditemukan dalam kutipan berikut: *“Jihad juga bisa dimaksudkan untuk memerangi orang kafir, tetapi orang kafir harbi, bukan orang kafir yang meminta perlindungan orang Islam.”* (h.34).

Di sini secara bahasa, jihad dimaknai mengerahkan segala kekuatan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Menurut istilah ulama fiqih, jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. Syarat-syarat wajib jihad pun menunjukkan makna jihad dalam makna yang konservatif seperti: beragama Islam, sudah mencapai usia dewasa atau *baligh*, berakal sehat, merdeka, laki-laki, sehat badannya, dan mampu berperang (h.47).

Namun demikian, kecenderungan makna moderat juga ditemukan dalam buku Fiqih kelas XII, bahwa “Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam tidak menyukai kekerasan, pemaksaan maupun merampas hak orang lain.” Bahkan dijumpai pula pemaknaan progresif, bahwa tidak kalah pentingnya dengan jihad bersenjata untuk dilakukan saat ini yaitu jihad membangun peradaban, yaitu jihad untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, dan ekonomi (h.42). Kebolehan berperang dinyatakan dengan prasyarat yang ketat, bahwa:

“Jika dalam kondisi terdesak dan harus mengangkat senjata untuk melawan musuh, kita seharusnya tetap melakukannya sesuai batasan etika berperang dalam Islam” (h.55).

Jihad dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh oleh seorang Muslim melawan kejahatan dan kebatilan. Jihad dilakukan melalui kerja hati, kerja lisan, kerja akal, dan kerja badan yang berupa perang atau lainnya. Kecenderungan makna konservatif-eksklusif nampak pada penjelasan berikut:

"Jihad merupakan sikap dan tindakan tegas dalam memegang keyakinan terhadap keesaan Allah hingga tak ada celah sedikitpun untuk bersikap yang berpotensi merusak keimanan itu. Bahkan dalam konteks tertentu kita dilarang untuk menyerupai mereka yang tidak beriman akan keesaan Allah" (h.34-45).

Buku ini mencoba melakukan pemaknaan jihad secara kontekstual sebagaimana dikutip berikut:

"dalam konteks kekinian, jihad melalui lisan dan penjelasan petunjuk agama dapat dilakukan dengan pendekatan verbal (*al-bayân al-syafahiy*), seperti khutbah dan pengajian, pendekatan melalui tulisan (*al-bayân al-tahrîriy*) seperti buku, majalah, bulletin dan lain sebagainya, pendekatan media (*al-bayân al-'lâmîy*) seperti televisi, radio dan media online, dan pendekatan dialog (*al-hiwâr*), seperti dialog antar agama atau dialog peradaban. Jadi selain jihad 'militer' (bersenjata/ *al-jihâd al'askariy*) ada bentuk-bentuk lain dari jihad dalam Islam, yaitu jihad spiritual (*al-jihâd al-rûhiy*) yang obyeknya adalah jiwa manusia yang selalu cenderung mengikuti hawa nafsu dan jihad dalam bentuk dakwah (*al-jihâd al-da'wiy*) dengan menyampaikan risalah *al-Qur`an* secara baik dan benar" (h.42).

Upaya kontekstualisasi ini masih setengah hati, belum menyajikan makna jihad dalam konteks masyarakat Indonesia karena masih mengafirmasi jihad adalah perjuangan perang. Dengan pemaknaan ambivalen yang tidak ada kejelasan makna jihad, maka dikuatirkan menimbulkan pemahaman bahwa jihad dengan perang adalah tingkat tertinggi. Karenanya, diperlukan redefinisi makna jihad yang selain kontekstual juga progresif, khususnya dalam konteks keindonesiaan. Selain itu, penegasan jihad tertinggi dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia adalah jihad membangun perdamaian dan merawat kebinekaan, bukan melakukan perang (Wijaya, 2018).

Ambivalensi lain ditemukan dalam ajaran tentang "pembunuhan" (*qital*). Dalam Fikih kelas XI dinyatakan bahwa membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Pesan ini merujuk pada firman Allah SWT:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar" (QS. *Al-Isra'*: 33).

Selain itu juga ditegaskan bahwa Islam yang merupakan agama *rahmatan lil'alamin* selalu menebarkan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan bagi para pemeluknya. Islam melarang praktik pembunuhan dengan cara apapun (h.7). Pada buku ajar Fikih kelas XI pembahasan larangan membunuh terdapat pada hadits "Pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka" (HR. al-Bukhari-Muslim) (h.6). Namun, setelah hadits ini, dijelaskan kebolehan membunuh orang kafir. Adapun yang kafir yang boleh dibunuh adalah kafir *harbi*, yaitu kafir yang melakukan tindak kezaliman kepada kalangan muslimin hingga sampai pada tahapan "memerangi". Sedangkan kafir *dzimmi* adalah kafir yang berada di bawah kekuasaan penguasa Muslim dan berinteraksi secara damai dengan kalangan muslimin (h.11). Dijelaskan dalam buku ini bahwa penguasa Muslim berhak menghukum seorang

Muslim yang membunuh kafir *dzimmi*. Problemanya tidak dijelaskan siapa kafir *dzimmi* dalam konteks Indonesia. Larangan membunuh tidak koheren dengan ajaran pembunuhan yang ditemukan pada kelas XII. Misalnya ketika menjelaskan 'am, yang menurut bahasa artinya merata atau umum. Istilah 'am memberi pengertian mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Ketika menjelaskan materi ini penulis buku memberikan contoh ayat: "...bunuhlah orang-orang musyrik". Perintah ini diarahkan kepada semua orang musyrik seluruhnya, tanpa dibatasi jumlah (h.144). Ajaran ini memberikan pemahaman bahwa seluruh orang musyrik dapat dibunuh semuanya.

D. SPEKTRUM IDEOLOGI GURU PAI MADRASAH ALIYAH

Spektrum ideologi guru saat ini sedang mendapat sorotan dan kajian akademisi. Survei PPIM UIN Jakarta (2018) menyatakan bahwa guru di Indonesia mulai dari tingkat TK/RA hingga SMA/MA memiliki opini intoleran dan radikal yang tinggi. Secara umum, persentase guru yang memiliki opini yang intoleran sudah di atas 50%. Sebanyak 46.09% guru memiliki opini radikal, 37.77% guru intoleran, dan 41.26% yang radikal. Hasil survei tersebut mengkuatirkan bagi kehidupan Indonesia yang majemuk. Terkait dengan situasi yang digambarkan oleh hasil survei terdahulu tersebut, riset ini hendak melihat spektrum ideologi guru di lima kota-provinsi yaitu Surakarta, Yogyakarta, Jakarta, Cirebon dan Manado. Hasil wawancara mendalam dan FGD guru di lima wilayah tersebut menunjukkan corak ideologi yang ambivalen sekaligus unik.

1. Konservatif dalam Keyakinan, Moderat dalam Praktik

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme teologis ternyata tidak selalu berhubungan secara kausalitas dengan ekstremisme atau radikalisme. Kenyataannya bahwa sebagian besar guru-guru PAI ini secara teologis sangat puritan (istilah Peacock), konservatif (istilah Bruinessen), dan fundamentalis (istilah Beck), tetapi memiliki hubungan sosial yang harmonis dengan kolega dan kerabat yang beragama Kristen. Secara umum, guru-guru PAI dalam penelitian ini memiliki penerimaan yang tinggi terhadap demokrasi dan kehidupan multikultural, walau pengejawabannya melalui pola yang beragam. Mereka pada umumnya sepakat bahwa hubungan sosial yang harmonis lintas agama dan budaya adalah kunci keberhasilan membangun masyarakat. Mereka juga sebagian besar percaya bahwa kerukunan antar umat beragama menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melewati masa-masa penuh gesekan, ketegangan, dan konflik. Mereka mendefinisikan kehidupan sosial sebagai perpaduan dan interaksi antar berbagai orang dari latar belakang sosial, agama, dan budaya yang beragam.

Terkhusus di Manado, sebagian besar informan guru mengungkapkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup berdampingan secara *pro-existence* dengan orang-orang yang berasal dari agama Kristen. Relasi mereka setidaknya senada dengan delapan model interaksi bermakna yang dirumuskan Panggabean (2018), yakni: (1). Saling mengunjungi antar keluarga; (2). Datang ke acara pernikahan; (3). Bertemu saat acara publik/festival; (4). Datang ke acara pemakaman atau mengunjungi keluarga yang berduka; (5). Datang ke acara syukuran/selamatan keluarga; (6). Pergi makan bersama; (7). Memiliki pengalaman masa kecil dengan orang beragama lain; (8). Keluarganya memiliki hubungan sosial dengan orang beragama berbeda. Dalam penelitian ini, khususnya untuk Manado, menunjukkan bahwa interaksi bermakna disebabkan oleh hubungan kekerabatan. Misalnya bahwa beberapa guru PAI memiliki mertua dari agama Kristen. Mereka berupaya menjaga supaya hubungan ini harmonis dan berjangka panjang dengan mengucapkan selamat hari Natal serta menghadiri upacara kematian.

Delapan interaksi bermakna tadi menyiratkan model praktik sosial beragama yang moderat. Kendati demikian, guru-guru PAI memperlakukan teks-teks agama sebagai doktrin yang tertutup. Mereka misalnya secara bergantian mendefinisikan orang beragama selain Islam dengan “non-Muslim”, “orang Kafir”, atau “orang sebelah”, dan mendefinisikan diri mereka sendiri sebagai “orang yang lurus”, “orang yang diberi petunjuk”, dan “orang yang saleh”. Istilah semacam “orang Kafir” diperlakukan sebagai doktrin tertutup karena dipahami secara asumptif, yakni “orang-orang yang bukan Islam”. Padahal dalam ajaran Islam kata *kafara* dapat mengacu pada siapa saja yang dianggap menyimpang dari perintah Tuhan. Implikasinya adalah mereka menempatkan penggunaan kata “kafir” ketika konteksnya bernada penolakan atau resisten. Misalnya ketika mereka menyatakan tidak ingin memiliki presiden dari latar agama selain Islam atau saat menjelaskan ketidaksukaan terhadap doktrin. Nada-nada penolakan semacam ini berpadu rumit dengan narasi atas kekecewaan terhadap negara dan perasaan didiskriminasi. Penelitian ini harus berhati-hati memilah antara nada konservatif yang disebabkan oleh benturan teologis (*theological roots of conservatism*) dan persoalan ekonomi-politik (*social roots of conservatism*).

Corak wawasan keagamaan informan guru semacam ini mengkonfirmasi tesis moderat pragmatis atau *the pragmatic moderatism* (Burhani, 2018). Konservatisme akidah dan moderatisme akhlak para guru nampak ketika menanggapi isu “mengucapkan selamat Natal”. Sebagian besar secara tegas dan tertutup menolak mengucapkan selamat Natal, bahkan jika niatan pengucapannya adalah untuk menjaga resiprositas sopan-santun sosial, bukan

dengan niatan menyetujui kelahiran Yesus Kristus. Hanya sebagian kecil guru --setelah perdebatan lama dalam FGD-- menyatakan boleh mengucapkan selamat natal sebagai wujud solidaritas sosial. Itupun dengan syarat, agar ucapan diubah menjadi kalimat "Selamat Merayakan" atau "Selamat" saja, tanpa menyebutkan kalimat "Natal". Informan guru yang membolehkan ucapan "selamat merayakan" berkeyakinan bahwa dengan melakukan hal ini, akidah Islamnya tidak goyah sama sekali.

Konteks di Surakarta berbeda dengan Manado. Guru PAI Surakarta berpandangan bahwa mengucapkan selamat Natal dan berdoa bersama antar umat beragama harus menjadi "urusan" agama masing-masing. Mengucapkan selamat Natal, bagi guru PAI, adalah testimoni yang dapat meruntuhkan iman dan bahkan dapat membatalkan keislaman seseorang. Banyak guru dari Surakarta, Cirebon dan Jakarta menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal berarti memberi persaksian tentang ketuhanan Yesus, dengan analogi pengucapan kalimat syahadat untuk persaksian terhadap Allah Yang Esa dan nabi-Nya. Namun, para guru juga ambivalen dalam hal ini: mereka berpandangan bahwa ucapan Natal tidak menjadi "persoalan" bila dilakukan oleh pejabat publik yang bertujuan menjaga kerukunan dalam kebinekaan.

Di Jakarta, guru PAI umumnya mengalami ambiguitas terhadap demokrasi, yakni mengakui demokrasi tetapi enggan menerima keseluruhan nilai-nilai di dalamnya. Penerimaan demokrasi bersifat setengah hati. Ketika diajukan pertanyaan tentang bagaimana menyikapi adanya pemimpin non-Muslim, respon guru langsung reaktif: menolak keras. Pengucapan selamat Natal terhadap umat Kristiani pun ditentang tegas, karena dianggap merusak akidah. Kegiatan do'a bersama antar umat beragama dimaknai oleh mayoritas guru di Jakarta sebagai kegiatan yang sia-sia. Mereka menyarankan bahwa kegiatan berdo'a lebih baik dilakukan oleh masing-masing umat beragama saja, tidak perlu melibatkan agama-agama maupun keyakinan yang lain.

Ambiguitas demokrasi juga terjadi di Cirebon. Di satu sisi, guru meyakini bahwa demokrasi yang diterapkan Indonesia sudah sesuai dengan nilai dasar prinsip musyawarah yang terkandung dalam Islam. Hanya saja, sistem *voting* dalam demokrasi, tidak sesuai dengan konsep Islam, sebagaimana dituturkan seorang informan:

"Demokrasi itu bukan Islam. Tapi sebagian dari demokrasi menurut saya sudah Islami. Demokrasi lahir bukan dari Islam tetapi bersifat Islami. Demokrasi itu budaya, maka kebenarannya hanya sedikit. Kalau Islam kan sudah mutlak. Meskipun demokrasi tidak sesuai dengan syari'at Islam, tetapi Islami. Nah voting itu nggak Islami. Lha kalau yang votingnya jahat semua, ya mereka menang itu."

Berbeda dengan konteks di Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan berbudaya ragam, guru PAI memiliki kecenderungan kuat pada penerimaan terhadap demokrasi Pancasila. Demokrasi

Pancasila dipandang sebagai bentuk final yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang beragam dalam agama maupun etnis. Hampir semua guru menyadari bahwa peletak demokrasi bangsa ini adalah tokoh-tokoh yang mumpuni dalam ber-Islam. Karenanya, dasar-dasar demokrasi yang dibangun pun sudah selaras dengan nilai-nilai Islam.

Guru di Yogyakarta menyatakan bahwa kekerasan apapun dan terhadap siapapun tidak boleh dilakukan, karena hal tersebut tidak sejalan dengan ajaran Islam. Pemahaman ini menunjukkan pandangan progresif karena mengedepankan kemanusiaan. Para guru mengungkapkan, tidak memiliki sikap sentimen terhadap pemeluk agama yang berbeda. Namun, meskipun pada satu sisi guru mengedepankan sisi progresif, pada sisi lain yang terkait dengan akidah, para guru di Yogyakarta tetap menunjukkan sikap konservatif. Sikap tersebut nampak pada pandangan terhadap do'a bersama antar umat beragama. Bagi guru, berdo'a adalah urusan ibadah yang tidak boleh dicampur adukkan dengan ritual agama lain. Namun ada pula guru yang menyatakan, selama doa yang dilakukan bersifat umum dan tidak memuat doktrin dan lafal-lafal keagamaan, maka boleh dilakukan. Ada pula yang mengungkapkan kita tidak boleh mengikuti doa umat agama lain, tapi umat agama lainlah yang harus mengikuti doa kita. Sikap ini tentunya tidak sejalan dengan semangat toleransi karena ada undur pemaksaan kehendak dari umat Islam kepada umat yang lain. Para guru dengan tegas menyatakan bahwa sikap toleransi tidak boleh dilakukan bila terkait dengan urusan ibadah, karena berpegang pada ajaran agama "bagimu agamamu, dan bagku agamaku."

2. Toleransi Kembar di Lima Kota

Dalam penelitian ini ditemukan model dan sikap toleransi yang beragam dari guru PAI di lima kota. Ada beberapa istilah untuk mendeskripsikan pelbagai model toleransi yang ditemukan dalam riset ini, antara lain: (1) toleransi konservatif (*conservative tolerance*), mengacu pada pemberlakuan doktrin teologis secara tertutup tetapi berkomitmen penuh terhadap kehidupan yang harmonis; (2) toleransi progresif (*progressive tolerance*), merujuk pada penafsiran terbuka terhadap doktrin teologis, sembari aktif terlibat dalam pembentukan masyarakat terbuka; (3) toleransi malas (*lazy tolerance*), berupa pandangan praktik-praktik masyarakat beragama yang menyerukan toleransi dalam ruang-ruang diskusi, namun mandeg dalam praksis kehidupan sehari-hari; (4) toleransi mahal (*costly tolerance*), yaitu kesediaan untuk menerima satu sama lain sepenuhnya berdasarkan kesetaraan dan terlepas dari hubungan kuasa ("*equality as a value in itself, irrespective of power relationship*"). Toleransi otentik terjadi bila seseorang atau suatu kelompok memiliki kuasa untuk menekan, tetapi mereka tidak melakukannya.

Merujuk pada Suhadi (2018) yang mengenalkan istilah toleransi mahal (*costly tolerance*) dan toleransi murahan (*cheap tolerance*), toleransi mahal ditemukan di kota Yogyakarta dan Cirebon. Guru PAI di kedua kota ini memiliki penghargaan yang kuat bahwa keunggulan umat Islam Indonesia adalah "toleransi". Model toleransi ini terjadi bila seseorang atau kelompok memiliki kuasa untuk menekan, tetapi mereka tidak melakukannya. Konteks di Cirebon, guru PAI berpandangan bahwa sikap toleran merupakan aset bangsa yang perlu dijaga dan dikembangkan. Menghargai perbedaan di tengah heterogenitas masyarakat baik internal umat Islam sendiri atau dengan non-Muslim merupakan warisan pendahulu yang tidak ternilai. Sebagaimana diungkapkan oleh KM CN1, salah satu guru PAI di Cirebon ketika ditanya prestasi umat Islam:

"Prestasinya Muslim di Indonesia adalah (jiwa) sosialnya tinggi karena di Indonesia masyarakatnya hidup berdampingan dengan yang lainnya, berbeda-beda keyakinan tapi tetap rukun, hal itu terjadi karena rasa nasionalisme pada umat Islam".

Sama halnya di Yogyakarta, para guru menyatakan bahwa umat Islam memiliki keunggulan dalam hal toleransi dan kerukunan. Berikut salah satu kutipan HL dari MAN 1YK:

"Keunggulan umat islam di Indonesia itu yang pertama, Indonesia itu terkenal umat islamnya terkenal dengan toleransinya yang tinggi terus yang kedua umat islam di Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong ya seperti sekarang kita lihat lah kalau ada satu yang terkena kasus kan kalau isu keagamaan itu sangat cepat sekali menyebarnya."

Berkaitan dengan pemilihan pemimpin, sebagian guru tidak bisa menerima pemimpin non-Muslim, dan sebagian lagi masih bisa menerima asalkan memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Salah satu guru madrasah swasta menyatakan:

"Tidak setuju. Eee pada zaman khalifah Abu Bakar itu ada sekretarisnya yang kebetulan orang Yahudi. Kemudian setelah Abu Bakar tahu itu adalah Yahudi, langsung dipecat. Jadi kita harus keras dengan orang-orang non-Muslim dalam kepemimpinan."

Dalam konteks Surakarta, ada kecenderungan toleransi yang bersifat basa-basi (*lip-service tolerance*), tidak kokoh sebagai pondasi harmoni masyarakat majemuk yang dalam bahasa Paul F. Knitter (2004) disebut sebagai toleransi malas (*lazy tolerance*). Hanya sedikit informan guru PAI di Madrasah Aliyah Jakarta yang mengapresiasi kegiatan do'a bersama dengan agama lain. Disposisi psikososial ini diakibatkan terbiasa bertumbuh dalam komunitas Muslim yang homogen, hingga usia dewasa bekerja pun di lembaga pendidikan Islam. Karenanya, mayoritas guru tidak memiliki pengalaman dan ruang pertemuan dengan mereka yang berbeda agama. Dari hasil wawancara, sangat sedikit guru yang menganggap kegiatan do'a bersama antar-umat beragama itu sesuatu yang positif untuk dilakukan. Secara umum bahkan tidak ada guru yang pernah terlibat langsung dalam kegiatan doa bersama, kecuali satu guru madrasah

yang pernah beberapa kali terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh S dari JKT3: "Kurang setuju do'a bersama. Karena cara tiap agama kan berbeda. Kalau berdoa ya harus sesuai dengan audiensnya". Pada tema pemimpin non-Muslim, secara umum para guru PAI di DKI Jakarta menolak dan menyatakan tidak mungkin memilih pemimpin politik dari non-Muslim.

Doktrin tertutup yang dianut mayoritas guru tidak hanya sebatas relasi antar agama, tapi juga untuk isu-isu kesalehan personal. Sebagai contoh, guru-guru PAI menyatakan bahwa berjilbab adalah wajib bagi semua perempuan Muslim. Mereka menganggap kesalehan seorang Muslimah ditandai oleh penggunaan jilbab. Alasan mereka adalah jilbab sebagai "benteng akhlak". Hampir semua informan guru menyatakan bahwa dengan berjilbab, seorang perempuan menampakkan komitmen yang tinggi terhadap ajaran Islam. Namun, pada sisi lain mereka mentolerir seorang perempuan yang tidak berjilbab, jika kondisi itu merupakan bagian sebagai proses menuju pengukuhan menjalankan perintah agama. Dalam tuturan seorang informan yang merupakan perwakilan suara inform lainnya: "Jilbab adalah harga mati, perintah. Seharusnya seorang muslimah wajib memakai jilbab. Walaupun menutup aurat tidak ada dalam materi. Saya sisipkan di materi. Bagi yang belum sempurna pakai jilbab itu proses" (HY, MDOGN7). Menariknya ketika ditanya tentang fenomena artis yang berhijab, ia menunjukkan sikap senang dengan penampilan artis tersebut, tetapi tetap mengkritisi. Ia berpendangan bahwa fenomena artis berjilbab sebatas sensasi saja, yaitu sudah "hijrah" tapi masih memosting foto-foto lama yang tidak berjilbab. Terhadap fenomena remaja putri yang bercadar, sebagian informan di 5 kota menyatakan kurang apresiatif, karena lebih sebagai komodifikasi budaya berpakaian untuk jazirah Arabia yang berpadang pasir dan panas, bukan merupakan tuntunan ajaran Islam. Beberapa informan menyatakan cadar adalah trend budaya.

Hampir semua informan guru berpendapat bahwa isu jihad harus diperlakukan sebagai doktrin terbuka. Muslim hendaknya tidak terjebak dengan konteks ayat atau kisah perang yang selama ini melekat pada konsep jihad. Menurutnya orang harus berhati-hati dalam mendefinisikan makna Jihad karena sifat diksi yang plural-beragam (berjuang di jalan Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh). Hampir semua guru bersepakat bahwa arti jihad yang tepat adalah bersungguh-sungguh dalam setiap ikhtiyar kebajikan yang sering disertai oleh banyak tantangan dan cobaan, misalnya ikhtiyar mensejahterakan keluarga, menuntut dan menyebarkan ilmu, dan menolong sesama yang membutuhkan. Corak wawasan keagamaan informan guru semacam ini mengkonfirmasi tesis moderat pragmatis atau *the pragmatic moderatism* (Burhani, 2018).

Konservatisme akidah dan moderatisme akhlak para guru nampak ketika menanggapi isu “mengucapkan selamat natal”. Sebagian besar secara tegas dan tertutup menolak mengucapkan selamat natal, bahkan jika niatan pengucapannya adalah untuk menjaga resiprositas sopan-santun sosial, bukan dengan niatan menyetujui kelahiran Yesus Kristus. Hanya sebagian kecil guru yang setelah perdebatan lama dalam FGD menyatakan boleh mengucapkan selamat natal sebagai wujud solidaritas sosial, tetapi dengan syarat ucapan diubah menjadi kalimat “Selamat Merayakan” atau “Selamat” saja, tanpa menyebutkan “Selamat Natal”. Informan guru yang membolehkan ucapan “selamat merayakan” berkeyakinan bahwa dengan melakukan hal ini akidahnya Islamnya tidak goyah sama sekali.

Kasus dan narasi hasil temuan penelitian yang dipilih untuk dipaparkan di atas menampakkan pergolakan tarik-menarik polarisasi dan konvergensi antara kesadaran kohesi sosial berbasis kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*) dan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*). Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakselarasan atas perjumpaan dan irisan diantara wacana keislaman, nasionalisme dan humanisme. Dengan kata lain, informan penelitian menunjukkan ambivalensi dan incompatibilitas antara titian-titian sikap toleran-pluralis namun sekaligus doktrinal eksklusif. Psikologi akan menyebut fenomena ini sebagai *cognitive dissonance*, untuk menjelaskan situasi dimana beberapa keyakinan tertentu dalam diri individu saling berseberangan dalam praktik walau dalam pikiran dianggap selaras. Contoh lain dari *cognitive dissonance* adalah keyakinan bahwa tolong-menolong lintas agama mutlak dibutuhkan. Namun pada praktiknya, tolong menolong tinggi jika melibatkan relasi kekerabatan dan kesamaan iman. Pada konteks tertentu sangat mempertimbangkan latar belakang agama untuk memutuskan prioritas bantuan, memilih pemimpin, melakukan do'a bersama, dan memilih persahabatan serta perjodohan.

Sebaliknya, dalam konteks kehidupan sosial dimana umat Islam menjadi minoritas, guru PAI di Manado menunjukkan toleransi yang kuat, karena terbiasa hidup berdampingan dengan umat agama lain. Pembentukan pemahaman toleransi guru Manado didorong oleh solidaritas geografis: mereka tumbuh secara sosial dalam relasi pertetanggaan dan perkerabatan dengan orang-orang dari beragam latar belakang etnis dan agama. Di Manado ditemukan dua model toleransi yaitu toleransi konservatif dan toleransi progresif. Toleransi konservatif mengacu pada pemahaman doktrin teologis secara tertutup tetapi berkomitmen penuh terhadap kehidupan yang harmonis, sedangkan toleransi progresif merujuk pada penafsiran dan sikap terbuka terhadap doktrin teologis dan hidup sosial. Namun, sikap toleransi sebagian guru PAI Manado juga nampak ambivalen dan ambigu. Misalnya dalam memandang kepemimpinan non-Muslim,

mereka menolak Presiden non-Muslim, tetapi tegas menerima Gubernur atau Bupati dalam konteks lokal. Toleransi progresif sangat minor dalam narasi-narasi praktik sosial informan guru dalam penelitian ini. Kendati demikian, mereka memiliki kesepakatan tentang pentingnya menjaga keharmonisan sosial.

3. Guru sebagai Agen Moderasi Islam

Hasil temuan berbagai riset selama ini menggambarkan guru-guru agama sebagai agensi yang mengajarkan paham keagamaan ekstrem. Penelitian ini menemukan kecenderungan yang berbeda. Guru madrasah mampu menjadi agen moderasi pemikiran keagamaan ditemukan dalam konteks Manado, diikuti oleh Cirebon dan Yogyakarta dalam urutan kekuatan Islam moderat. Temuan ini senada dengan Mark Woodward dkk (2013) yang menyangkal adanya kaitan antara pendidikan Islam di Indonesia dengan radikalisme. Sekolah Islam di Manado, Cirebon dan Yogyakarta justru berfungsi sebagai wahana moderasi pemahaman keagamaan siswa. Ruang kelas dan guru PAI di Madrasah Aliyah menjadi mediator dan fasilitator bagi para siswa yang kerap mendapatkan paham keagamaan intoleran-eksklusif yang didapat dari kelompok-kelompok pengajian *online* maupun *offline*.

Dalam penelitian ini, konteks di Manado, Cirebon dan Yogyakarta justru menunjukkan bahwa pendidikan Islam di madrasah menjadi mekanisme peredam radikalisme dengan menjadikan kelas sebagai ruang diskusi mengembangkan moderatisme Islam. Meskipun sebagian besar mereka berada pada spektrum ideologi toleransi-konservatif, mereka seringkali mengambil peran penting untuk memperkenalkan Islam moderat. Mereka berupaya memfasilitasi pemahaman inklusif terutama di ruang kelas. Di Madrasah Aliyah, guru tidak menganjurkan siswa untuk mengkonfrontasi secara langsung perbedaan doktrin agama dengan penganut ajaran lain. Mereka menyarankan untuk merawat hubungan yang harmonis.

Betapa guru memiliki peranan keagenan yang signifikan dalam membentuk corak dan arah keberagamaan siswa di Madrasah Aliyah. Hasil riset menunjukkan bahwa 64% guru hanya menggunakan sebagian dari muatan buku ajar, selebihnya guru melakukan modifikasi dengan mencari rujukan di luar buku terbitan Kemenag. Artinya, buku ajar tidak begitu berpengaruh membentuk ideologi siswa. Alih-alih, adalah guru yang menjadi aktor penting bagi pembentukan ideologi keagamaan siswa. Informan guru di Cirebon dan Manado menyatakan, yang rentan pada wacana ekstremisme dan intoleransi adalah justru pemahaman keagamaan di luar pesantren dan madrasah, khususnya di sekolah-sekolah yang terpapar oleh proses Islamisasi populer.³ Hal

³ Peran literatur keislaman dalam persemaian ideologi Islamis di kalangan pelajar dan mahasiswa sangatlah signifikan. Ideologi islamis umumnya menyusup melalui buku-buku dan

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh CSRC (2018) bahwa pendidikan agama di sekolah formal belum mampu menjawab kebutuhan pendidikan agama kaum muda Muslim serta belum optimal dalam membentengi mereka dari arus konservatisme. Salah satu dampaknya, kaum muda Muslim mencari sumber belajar tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuannya di luar bangku sekolah termasuk melalui media sosial. Mereka belum dapat memilah dan memilih kemana dan media semacam apa yang akan membawa ke arah corak keberagaman mereka (Bamualim, 2018). Akan tetapi, dalam konteks di Manado, Cirebon dan Yogyakarta pada penelitian ini, justru menunjukkan bahwa pendidikan Islam di madrasah menjadi mekanisme peredam radikalisme dengan menjadikan kelas sebagai ruang diskusi mengembangkan moderatisme Islam.

E. PELUANG MODERATISME

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa pada dasarnya buku ajar PAI terbitan Kemenag untuk Madrasah Aliyah memiliki komitmen kuat pada pengembangan Islam moderat. Faktor utama moderatisme tersebut adalah komitmen pemerintah terutama Kemenag dalam mengokohkan Islam moderat. Faktor lainnya adalah Kurikulum 2013 yang memiliki semangat pembelajaran saintifik-kontekstual. Selain itu, temuan di lima kota menunjukkan bahwa ideologi guru berkisar antara spektrum konservatisme dan moderatisme: konservatif dalam teologi, namun dalam praktiknya guru-guru cenderung moderat dan toleran. Ada banyak penanda bahwa guru berperan menjadi agen moderatisasi pemikiran siswa yang kerap mendapatkan asupan paham eksklusif dan radikal dari luar madrasah.

Salah satu isu penting yang menggambarkan peran ini misalnya topik Jihad dan Negara Islam. Guru-guru PAI sepakat bahwa makna istilah jihad sangat luas, tidak terkait dengan perang melawan orang kafir. Di dalam kelas mereka menerima diskusi mendalam tentang topik jihad. Hampir semua informan di 5 kota-provinsi menyatakan bahwa jihad itu bukan perang bersenjata atau kekerasan, namun komitmen melawan hawa nafsu. Tidak ditemukan guru yang berpandangan bahwa jihad adalah kekerasan. Semua guru berpijak pada pemahaman jihad yang moderat bahkan progresif.

bacaan keagamaan yang menyebar di kalangan pelajar dan mahasiswa. Literatur ideologi Islamis —mengajarkan tentang totalitas penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan dan bermuara pada keinginan mengganti sistem negara-bangsa demokratis dengan khilafah, bahkan jika perlu ditempuh dengan kekerasan— hadir mencolok, membanjiri arena dan lanskap sosial di sekitar SMA dan Perguruan Tinggi Indonesia. Lihat Noorhaidi (ed), *Literatur Keislaman Generasi Milenial*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Misalnya saja konteks Surakarta, yang dianggap sebagai sarang radikalisme. Guru cenderung berpandangan moderat, menyatakan bahwa isu jihad harus diperlakukan sebagai doktrin terbuka. Muslim hendaknya tidak terjebak dengan konteks ayat atau kisah perang yang selama ini melekat pada konsep jihad. Hampir semua guru di Surakarta bersepakat bahwa arti jihad yang tepat adalah bersungguh-sungguh dalam setiap ikhtiyar kebajikan yang sering disertai oleh banyak tantangan dan cobaan, misalnya ikhtiyar mensejahterakan keluarga, menuntut dan menyebarkan ilmu, dan menolong sesama yang membutuhkan. AR sebagai guru SKI di SOCN2 Surakarta mengatakan:

"Jihad itu ya sesuai profesi masing-masing. Sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah. Bersungguh-sungguh dalam mengajar bila dia seorang guru, belajar yang giat bila dia menjadi seorang murid, tidak korupsi kalau dia di pemerintahan, dan lain-lain".

Para guru yang menjadi narasumber pada penelitian ini sepakat bahwa pemaknaan jihad bukanlah serta merta berperang di medan perang. Semua guru sepakat bahwa pemaknaan jihad harus dikembalikan pada makna asli bahasanya dan diaplikasikan pada semua aspek kehidupan, utamanya pada profesi masing-masing.

Sebagian kecil informan guru menganggap problem keberagaman eksklusif terletak pada kapasitas berpikir kritis guru dan siswa. Karena itu penting bahwa guru memiliki kemampuan menjelaskan *asbabun nuzul* suatu ayat, terutama ayat-ayat yang seringkali digunakan untuk melegitimasi kekerasan atas nama agama. Isu negara Islam menurut semua guru adalah tidak relevan dan tidak cocok untuk Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan syariah Islam yang tidak relevan akan menjadi masalah bagi masyarakat multikultural. Untuk Indonesia yang majemuk, demokrasi sebagai sistem politik masih merupakan pilihan paling tepat untuk menjaga iklim kebangsaan yang kondusif.

Meskipun ditemukan kegagalan kontekstualisasi materi ajar, buku ajar PAI masih memiliki potensi kuat untuk menjadi media belajar yang mengembangkan paham Islam moderat-kontekstual. Hal ini karena Kurikulum 2013 menuntut porsi yang besar kepada para guru untuk mengembangkan pembelajaran aktif, demokratis, berpikir kritis dan inovatif, bukan indoktrinatif. Akan tetapi problemnya adalah tidak semua guru PAI siap dengan cara kerja Kurikulum 2013. Apalagi sistem ini tidak dapat dimaksimalkan secara penuh, terutama di daerah-daerah dengan sarana pembelajaran terbatas. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa guru secara umum memandang buku ajar terbitan Kemenag cukup baik (untuk mengatakan belum baik), sebagian lain menganggap buku ajar belum lengkap, kurang mendalam, atau tidak detail. Tetapi pada saat yang sama guru juga menyadari bahwa buku ajar PAI didesain dengan Kurikulum 2013, menggunakan prinsip pembelajaran saintifik berbasis pencarian. Prinsip pembelajaran saintifik ini menuntut siswa dan guru

sama-sama aktif mencari sumber belajar selain yang ada di kelas, sehingga mau tidak mau guru harus kreatif dan inovatif.

F. KESIMPULAN

Kesimpulan utama adalah pada dasarnya, muatan materi buku ajar PAI Madrasah Aliyah adalah moderatisme-kontekstual, dengan kecenderungan orientasi menuju Islam berwawasan progresif. Faktor utama moderatisme tersebut adalah keberpihakan pemerintah terutama Kemenag untuk mengokohkan Islam moderat di Indonesia, juga semangat Kurikulum 2013 yang memiliki semangat pembelajaran kontekstual. Dalam temuan lapangan semua guru memang menggunakan buku ajar PAI terbitan Kemenag. Akan tetapi 64% melakukan modifikasi dan menggunakan rujukan dari literatur primer buku-buku atau kitab tafsir dan rujukan online (internet). Dengan demikian penelitian ini mendapati bahwapengaruh buku ajar tidak terlalu besar terhadap ideologi keagamaan siswa.. Di Madrasah Aliyah, guru justru menjadi agen utama yang membentuk corak pemahaman keislaman siswa, dan menjadi fasilitator dan mediator untuk memoderatisasi pemahaman siswa yang eksklusif dan radikal yang didapat siswa dari luar sekolah.

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian ini, dirumuskan beberapa rekomendasi untuk Buku Ajar dan Guru PAI di MA di bawah ini:

1. Kualitas literatur buku ajar perlu ditingkatkan dan diperbaiki agar pesan-pesan moderat, kontekstual, inklusif dan toleran lebih mudah disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada siswa. Selain itu, muatan materi yang mengandung ambivalensi, inkonsistensi, kontradiksi atau paradoks juga perlu diselaraskan agar koheren dan konsisten dalam pesan-pesan moderat-progresif tersebut.
2. Materi akhlak mendapatkan porsi yang besar (80%) dari isi buku. Artinya, buku ini lebih menekankan pada pembentukan akhlak siswa. Namun buku ini ditulis dengan memosisikan siswa sebagai pihak yang pasif, yang dikenai tindakan dari orang lain. Maka diperlukan perluasan materi akhlak dari akhlak yang sifatnya individual ke etika publik.
3. Fikih universal dan Kalam modern perlu disajikan diperkenalkan dalam buku ajar. Isu mayoritas dan minoritas menjadi tidak relevan dalam konteks negara bangsa. Istilah *dzimmi* (golongan minoritas yang dilindungi) pun juga tidak relevan untuk diangkat dalam Fikih sosial dan Kalam sosial modern.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru dalam hal orientasi keislaman moderat-progresif, serta peningkatan wawasan kebangsaan dan kemanusiaan di Madrasah Aliyah sederajat.

Pembinaan ideologi guru dari Kemenag menjadi sangat penting untuk terus dilakukan untuk mengokohkan Islam moderat.

5. Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI seyogyanya diberdayakan agar dapat menopang penguatan kompetensi guru PAI dan optimalisasi penggunaan buku ajar sebagai suluh keadaban bagi siswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR REFERENSI BACAAN

- Abdullah, M. Amin. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2016). *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrohman, dkk. (2014). *Buku Siswa Akidah Akhlak: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas X*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Alfan, Ahmad, dkk. (2014). *Buku Siswa Fikih: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas X*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Aljunied, Khoiruddin. (2016). *Muslim Cosmopolitanism: Southeast Asian Islam in Comparative Perspective*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Alwi, Dudung Basori, dkk. (2015). *Buku Siswa Al-Qur'an Hadis: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas XI*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Appleby, Scott. R. (1999). *The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Azizi, Muhammad Reza. (2016). *Buku Siswa Akidah Akhlak: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. (2002). *Ambivalensi Agama Konflik & Nirkekerasan*. Yogyakarta: LESFI.
- Bamualim, Chaider S., dkk. (2018). *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibrida Identitas dan Tantangan Radikalisme*. Jakarta: Center for The Study of Religion and Culture (CSRC).
- Beck, Herman. (2001). "The Borderline between Muslim Fundamentalism and Muslim Modernism: An Indonesian Example", dalam Jan Willem van Henten dan Anton Houtepen, *Religious Identity and the Invention of Tradition*. Assen, the Netherlands: Royal van Gorcum.
- Bloom, Benjamin S. (1956). *Taxonomy of educational objectives. Vol. 1: Cognitive domain*. New York: McKay.
- Bourdeu, Pierre. (2016). *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Boy, Pradana Z.T.F. (2007). "In Defence of Pure Islam: Conservative-Progressive Debate Within Muhammadiyah" M.A. Thesis. Canberra: Australian National University.

- Bruinessen, Martin Van. (2014). *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung: Mizan.
- Cox, James L. (2006). *A Guide to the Phenomenology of Religion: Key Figures, Formative Influences and Subsequent Debates*. London: T & T Clark International.
- El-Fadl, Khaled Abou. (2001). *And God Knows The Soldier: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, Maryland: University Press of America.
- Fadl, Khaled Abou El. (2006). *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Jakarta: Serambi.
- Hanafi. (1991). *Agama: Ideologi dan Pembangunan*. Jakarta: P3M.
- Hasan, Noorhaidi, dkk. (2018). *Peta Literatur Keislaman Generasi Milenial: Ideologi dan Jaringan, Convey Report*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Hill, Brennan R., Paul Knitter, William Madges. (2004). *Faith, Religion & Theology: A Contemporary Introduction*. USA: Twenty-Third Publications.
- Ichwan, Moch. Nur. (2014), "Menuju Islam Moderat Puritan: Majelis Ulama Indonesia dan Politik Ortodoksi Keagamaan", dalam Martin Van Bruinessen, *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung: Mizan.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: the Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Khalil, Muhammad. (2016). *Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Krathwohl, D. R. (2002). *A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice*. EBSCO Publishing.
- Ma'ruf, Amari, dkk. (2016). *Buku Siswa Fikih: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Madjid, Nurcholish. (1999). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- _____. (2000). *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina.
- Maulana, Dirga. (2017). "The Exclusivism of Religion Teachers: Intolerance and Radicalism in Indonesian Public Schools". *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*. Volume 24. Number 2.
- Moadell, Mansour dan Kamran Talattof. (2000). *Modernist and Fundamentalist Debates in Islam*. New York: Pagrave McMillan.
- Murray, F. B. (2007). *Disposition: A superfluous construct in teacher education*. *Journal of teacher education*.

- Nasuhi, Hamid dkk (ed.). (2018). *Intoleransi dalam Buku Pendidikan Islam?*. Jakarta: PPIIM dan Prenamedia Group.
- Noorhaidi (ed.). (2018). *Literatur Keislaman Generasi Milenial*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019. (2014). *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Ridha, Muhammad Jawwad. (2002). *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam (Perspektif Sosiologis-Filosofis)*, terj. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Rosyidi, Mukarrom Faisal, dkk. (2014). *Buku Siswa Al-Qur'an Hadis: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas X*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ruitenbergh, C. W. (2011). *The trouble with dispositions: A critical examination of personal beliefs, professional commitments and actual conduct in teacher education*. Ethics and Education.
- Rusyidi, Muh. Rifqi. (2016). *Buku Siswa Al-Qur'an Hadis: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Saeed, Abdullah. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London and New York: Routledge.
- Safi, Omid. (2003). *Progressive Muslims: On Justice, Gender, dan Pluralism*. England: Oneworld Oxford.
- Shihab, M. Quraish. (2012). *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soewarno, Tri Bimo, dkk. (2015). *Buku Siswa Fikih: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas XI*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Suhadi (ed). (2018). *Costly Tolerance: Tantangan Baru Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS).
- Suhadi. (2015). "The Politics of Religious Education, the 2013 Curriculum, and the Public Space of the School," *Report on Religious Life in Indonesia*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CSRC).
- Tuanaya, M. Husain, dkk. (2015). *Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas XI*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ula, Miftachul, dkk. (2014). *Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas X*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Usman, dkk. (2015). *Buku Siswa Akidah Akhlak: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas XI*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Wahid, Wawan Gunawan Abd. et. al. (2015). *Fikih Kebinnekaan: Pandangan islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, Dan Kepemimphan Non-Muslim*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Washil, Sobri. "*Filsafat Peripatetik dan Kritik Al-Ghazali Terhadapnya*". Unpublished Thesis.

Woodward, Mark, Inayah Rohmaniyah, Ali Amin, dan Diana Coleman. (2013). "*Pendidikan Islam, Perhelatan dan Kemeriahan: Strategi untuk Meredam Radikalisasi di Indonesia*", *Journal of the Tri*, Vol. VII., No. 4.



Fostering Tolerant Religious Education to
Prevent Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
Banten | 5419 Indonesia

Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com
Website: <https://convesindonesia.com>

Collaborative Program of:



Pusat Studi Budaya & Perubahan Sosial
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA**



PPIM
UIN JAKARTA



*Empowered lives.
Resilient nations.*